BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Daerah Yang Diajak Kerjasama

Pada pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur urusan pemerintahannya. Kebijakan otonomi daerah yang efektif akan meningkatkan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan alternatif pemecahan-pemecahan inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya. Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dasar serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Kebijakan otonomi daerah mendorong berkembangnya kerja sama antar daerah

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan akan lebih baik dengan memfungsikan kewenangan daerah dalam kerja sama daerah. Untuk mengoptimalkan potensi pemerintah, kerja sama daerah telah menjadi salah satu alternatif yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Kerja sama diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi suatu potensial pembangunan yang saling menguntungkan.

Pelaksanaan kerja sama daerah meliputi kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, kerja sama antar Pemerintah Daerah dan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga

Tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kerja sama dengan Provinsi/Kota (dengan metode hubungan multilateral dan

bilateral) dan Pihak Ketiga (Kementerian, BUMN, BUMD, Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi dan lembaga dalam negeri yang berbadan hukum lainnya), dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 6.1
Mitra Kerjasama

No.	Jenis Kerjasama Daerah	Mitra Kerjasama (Prov/Kab/Kota)
I	**Multilateral**	
	Mitra Praja Utama	1. Provinsi DKI Jakarta 2. Provinsi Jawa Barat 3. Provinsi Jawa Tengah 4. Provinsi D.I. Yogyakarta 5. Provinsi Jawa Timur 6. Provinsi Bali 7. Provinsi Lampung 8. Provinsi Banten 9. Provinsi Nusa Tenggara Barat 10. Provinsi Nusa Tenggara Timur
	Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek-jur	1. Provinsi Jawa Barat 2. Provinsi Banten 3. Kabupaten Bogor 4. Kota Bogor 5. Kota Depok 6. Kabupaten Bekasi 7. Kota Bekasi 8. Kabupaten Cianjur 9. Kabupaten Tangerang 10. Kota Tangerang 11. Kota Tangerang Selatan
	Kerjasama Bidang Transmigrasi	1. Provinsi Sulut 2. Kabupaten Minahasa 3. Provinsi Bengkulu 4. Provinsi Sulawesi Tenggara 5. Kabupaten Kapuas
II	**Bilateral**	
	Kerjasama Provinsi/ Kabupaten	1. Kesepakatan Bersama Anatara Gubernur Jawa Barat, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewab Yogyakarta, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bali, Gubernur Lampung, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Banten, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penanganan Bersama Warga Binaan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan

No.	Jenis Kerjasama Daerah	Mitra Kerjasama (Prov/Kab/Kota)
		Sosial Dan Orang dengan Masalah Kejiwaan/orang Dengan Gangguan Jiwa 2. Kesepakatan Bersama Anatara Gubernur Jawa Barat, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewab Yogyakarta, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bali, Gubernur Lampung, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Banten, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Integrasi Informasi Pangan dan Pengendalian Inflasi Daerah Anggota Mitra Praja Utama 3. Kesepakatan Bersama Anatara Gubernur Jawa Barat, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewab Yogyakarta, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bali, Gubernur Lampung, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Banten, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Pusat Tourism-Trade-Investment Mitra Praja Utama di DKI Jakarta
III	**Kerja Sama Pihak III**	1. Kesepakatan Bersama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasiona tentang Penanganan Permasalahan Tanah dan Legalisasi Aset di Provinsi DKI Jakarta 2. Kesepakatan Bersama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kamar Dagang Industri Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pengembangan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur; 3. Kesepakatan Bersama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Yayasan Pengembangan Perkotaan dan Daerah (Urban and Regional Development Institute) tentang Peran Serta dalam Perencanaan Tata Ruang di Provinsi DKI Jakarta; 4. Kesepakatan Bersama antara Pemprov

No.	Jenis Kerjasama Daerah	Mitra Kerjasama (Prov/Kab/Kota)
		DKI Jakarta dengan Asian Development Bank tentang Optimalisasi Keuangan Daerah; 5. Kesepakatan Bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta tentang Pengembangan Bidang Perekonomian dan Infrastruktur; 6. Kesepakatan Bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Novo Nordisk Indonesia tentang Pengelolaan Penyakit Diabetes Melalui Program Cities Changing Diabetes. 7. Kesepakatan Bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Peningkatan Percepatan Pelayanan Perizinan dan Kemudahan Berusaha Bagi Perusahaan Bidang Ekonomi Digital di Provinsi DKI Jakarta; 8. Kesepakatan Bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika tentang Kerja Sama Dalam Bidang Meteorologi, Klimatologi dan Goefisika Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta; 9. Kesepakatan Bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kepolisian Polda Metro Jaya tentang Pelayanan Terpadu Dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 10. Kesepakatan Bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Yayasan Pendidikan Robotik Indonesia Tentang Edukasi Robotik Di Provinsi DKI Jakarta;
		11. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pangkalan Utama TNI AL III tentang Bina Lingkungan Bagi Anak-Anak Prajurit dan PNS Pangkalan Utama TNI AL III Dengan SDN Kelapa Gading Barat 01 Yang Berdomisili Di Kelapa Gading Barat Jakarta Utara;

No.	Jenis Kerjasama Daerah	Mitra Kerjasama (Prov/Kab/Kota)
		12. Perjanjian Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma tentang Penyelengggaraan Penerimaan Pendidikan Bagi Putra/Putri Prajurit Dan TNI AU Dengan Sekolah-Sekolah Negeri Yang Berdomisili Di Wilayah Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma; 13. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS) tentang Bina Lingkungan Bagi Anak-Anak Prajurit Dan PNS Kopassus Dengan SMAN 29, SMPN 103, SDN Baru 01 Pagi, SDN 02 Pagi, SDN Baru 07 Pagi, Dan SDN Cijantung 03 Pagi Yang Berdomisili Di Cijantung Jakarta Timur;
		14. Perjanjian Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) tentang Bina Lingkungan Bagi Anak-Anak Anggota Dan Mantan Anggota Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) dengan SMAN 93 Jakarta; 15. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi tentang Pengoperasian, Pemeliharaan, Pelatihan Dan Alih Teknologi Pilot Project Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 16. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tentang Penyelenggaraan Edukasi Kesehatan Gerakan Ayo Minum Air Di Sekolah Dasar; 17. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat) tentang Penyelenggaraan Dukungan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman Dalam Rangka Pengembangan Kawasan

No.	Jenis Kerjasama Daerah	Mitra Kerjasama (Prov/Kab/Kota)
		Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Seribu Dan Sekitarnya; 18. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Permukiman di Provinsi DKI Jakarta; 19. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. ICI Paints Indonesia tentang Program Penataan Kolong Jalan Layang Non Tol Di Jalan Antyasari Kota Administrasi Jakarta Selatan; 20. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Jotun Indonesia tentang Program Penataan Kolong Jalan Layang Non Tol Di Jalan Antyasari Kota Administrasi Jakarta Selatan; 21. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Midi Utama Indonesia. Tbk tentang Penyelenggaraan Pendidikan Ritel Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan; 22. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk tentang Penyelenggaraan Pendidikan Ritel Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan; 23. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Yayasan Dharma Suci tentang Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau di Jalan Jembatan Tiga, Pluit Mas, kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara; 24. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prof. Moestopo (Beragama) tentang Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian

No.	Jenis Kerjasama Daerah	Mitra Kerjasama (Prov/Kab/Kota)
		Masyarakat; 25. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Link Net, Tbk tentang Penyelenggaraan Saran dan Isi Siaran Balai Kota Channel; 26. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Prov. DKI Jakarta dengan Lembaga Sertifikasi Produk PT. Sertifikasi Produk Indonesia tentang Pelayanan Pengujian Produk
		27. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Carsurin tentang Pelayanan Pengujian Produk; 28. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Lembaga Sertifikasi Produk PT. Global Inspeksi Sertifikasi tentang Pelayanan Pengujian Produk ; 29. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. TUV NORD Indonesia tentang Pelayanan Pengujian Produk; 30. Perjanjian Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. IAPMO Group Indonesia tentang tentang Pelayanan Pengujian Produk; 31. Perjanjian Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Universitas Indonesia tentang Praktik Kerja Lapangan, Penelitian Serta Pengabdian Masyarakat Untuk Program Studi Sarjana, Profesi dan Pasca Sarjana Fakultas Farmasi Universitas Indonesia; 32. Perjanjian Kerja Sama anatara Pemprov DKi Jakarta dengan PT. Artisan Wahyu (Gandaria City) tentang Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Di Kawasan Gandaria City Dan Sekitarnya; 33. Perjanjian Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Yayasan Belantara Budaya Indonesia tentang Pertunjukan Tari Seni Budaya Secara kolosal Pada Acara Torch Relay Asian Games XVIII Tahun 2018; 34. Perjanjian Kerja Sama anatara

No.	Jenis Kerjasama Daerah	Mitra Kerjasama (Prov/Kab/Kota)
		Pemprov DKi Jakarta dengan PT. Berau Coal tentang Penyediaan Stasiun Pengisian Listrik Bertenaga Surya; 35. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Paiton Energy tentang Supply Of Solar Electricity Power Stations, Recharging Station And Electric Motocycles; 36. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Propan Raya I.C.C. tentang Program Penataan Kawasan Kota Tua Wilayah Kelurahan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara; 37. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kantor Wilayan Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta tentang Legalisasi Aset Tanah Masyarakat; 38. Perjanjian Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Asian Development Bank tentang Optimalisasi Penerimaan Daerah; 39. Perjanjian Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Perkumpulan Gerakan One Kecamatan One Center For Enterpreneurship (OK OCE) tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu; 40. Perjanjian Kerja Sama anatara Pemprov DKi Jakarta dengan PT. ICI Paints Indonesia tentang Pengecatan Kampung Tematik Di Kawasan Kemayoran Administrasi Jakarta Pusat Dalam Rangka Menyambut Asian Games XVIII Tahun 2018; 41. Perjanjian Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kantor Wilayan Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta tentang Pengintegrasian Data Pertanahan; 42. Perjanjian Kerja Sama anatara Pemprov DKi Jakarta dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya tentang Koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

No.	Jenis Kerjasama Daerah	Mitra Kerjasama (Prov/Kab/Kota)
		dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta; 43. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kamar Dagang Industri Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pengembangan Bidang Perindustrian dan Energi; 44. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Yayasan Dompet Dhuafa dan Yayasan Aksi Cepat Tanggap tentang Pelaksanaan Buka Puasa Bersama dengan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta; 45. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Darah N.A.T; 46. 49.Perjanjian Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Bank DKI tentang Penyaluran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia Melalui Sarana Kartu Yang Berbasis Teknologi Perbankan di Provinsi DKI Jakarta; 47. Perjanjian Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PD Dharma Jaya tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu; 48. Perjanjian Kerja Sama anatara Pemprov DKi Jakarta dengan Universitas Trisakti tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat; 49. Perjanjian Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Politeknik Karya Husada Jakarta tentang Pelayanan dan Kajian Keperawatan dan Kebidanan serta Pengabdian Masyarakat; 50. Perjanjian Kerja Sama anatara Pemprov DKi Jakarta dengan Akademi Keperawatan Royhan tentang

No.	Jenis Kerjasama Daerah	Mitra Kerjasama (Prov/Kab/Kota)
		Pelayanan dan Kajian Keperawatan serta Pengabdian Masyarakat; 51. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan tentang Pelakasanaan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi Angkutan Umum; 52. Perjanjian Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan STIKES Medistra Indonesia tentang Pelayanan dan Kajian Keperawatan dan Kebidanan serta Pengabdian Masyarakat; 53. Perjanjian Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan STIKes Kesetiakawanan Sosial Indonesia tentang Pelayanan dan Kajian Keperawatan, PKL dan PKMD ahli teknologi Laboratorium Medik serta Pengabdian Masyarakat; 54. Perjanjian Kerja Sama anatara Pemprov DKi Jakarta dengan BPJS Kesehatan tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

2. Dasar Hukum

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan tentang kerja sama antar daerah itu terwadahi di dalam pasal 363, 364, 365, 366, 367, 368, 36 dan 370 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu bahwa :

1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayan publik, sinergi dan saling menguntungkan;
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh Daerah dengan:

3. Daerah lain:
4. Pihak ketiga;
5. Kerja sama dengan Daerah lain, dikatergorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela;
6. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah, penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
7. Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan kerja sama terdapat perubahan, namun sayangnya dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut, saat ini belum memiliki regulasi teknis untuk mengatur sistem, tata kelola dan pengaturan mengenai proses pelaksanaan kerja sama antar daerah. Oleh karenanya pelaksanaan kerja sama daerah masih mengacu kepada aturan sebelumnya dan peraturan teknisnya masih menggunakan ketentuan yang lama yakni :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
c. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pola Kerja Sama Daerah.
d. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1903/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tabel 6.2 Produk Hukum Kerja Sama Daerah

No	Tentang	Hari/Tanggal	Nomor
1.	Kesepakatan Bersama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero) tentang Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi	Kamis, 18 Januari 2018	6 Tahun 2018 dan MOU/0008/PTD/UT 0000/01/2018
2.	Kesepakatan Bersama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tentang Optimalisasi Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan	Selasa, 13 Februari 2018	Nomor 2 Tahun 2018 dan Nomor 417.5/455-KSD
3.	Kesepakatan Bersama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Peningkatan Percepatan Pelayanan Perizinan dan Kemudahan Berusaha Bagi Perusahaan Bidang Ekonomi Digital di Provinsi DKI Jakarta	Jumat, 4 Mei 2018	No.3/KS/A.1/2018 dan 8 Tahun 2018
4.	Kesepakatan Bersama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tentang Penanganan Permasalahan Tanah dan Legalisasi Aset di Provinsi DKI Jakarta	Senin, 04 Juni 2018	38/SKB/VI/2018 dan 16 Tahun 2018
5.	Kesepakatan Bersama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kamar Dagang Industri Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pengembangan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Kamis, 07 Juni 2018	11 Tahun 2018 dan 530/DP/IV/2018
6.	Kesepakatan Bersama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Yayasan Pengembangan Perkotaan dan Daerah (Urban and Regional Development Institute) tentang Peran Serta dalam Perencanaan Tata Ruang di Provinsi DKI Jakarta	Selasa, 3 Juli 2018	13 Tahun 2018 dan 001/MOU-DKI/URDI/07/2018 dan PN.IAP/JU/A.041/VII/2018
7.	Kesepakatan Bersama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Asian Development Bank tentang Optimalisasi Keuangan Daerah	Senin, 23 Juli 2018	19 Tahun 2018 dan 001/MOU/ADB-DKI/2018
8.	Kesepakatan Bersama Antara	Kamis, 09	Nomor 14 Tahun

No	Tentang	Hari/Tanggal	Nomor
	Pemprov DKI Jakarta dengan Kabupaten Blitar Tentang Penyediaan Kebutuhan Pangan dari Kabupaten Blitar untuk memenuhi kebutuhan Provinsi DKI Jakarta	Agustus 2018	2018 dan Nomor 119/1.27/409.05/2018
9.	Kesepakatan Bersama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Novo Nordisk Indonesia tentang Pengelolaan Penyakit Diabetes Melalui Program Cities Changing Diabetes	Jumat, 24 Agustus 2018	22 Tahun 2018 dan 086/NNID-LGC/MAPA/08/18
10	Kesepakatan Bersama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Meteorologi, Klimatologi,dan Geofisika tentang Kerja Sama Dalam Bidangan Meteorologi, Klimatologi dan Goefisika Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta	Kamis, 13 September 2018	25 Tahun 2018 dan KS.302/MoU.24/KB/IX/2018
11.	Kesepakatan Bersama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Yayasan Pendidikan Robotik Indonesia tentang Edukasi Robotik Di Provinsi DKI Jakarta	Kamis, 11 Oktober 2018	2018 (Sedang dalam proses penomoran)
12.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Depok, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tentang Pembangunan Sistem Ketahanan Pangan di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur	Kamis, 20 Desember 2018	2018 (sedang dalam proses penomoran)
13.	Kesepakatan Bersama Antara Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kota	Kamis, 20 Desember 2018	2018 (sedang dalam proses penomoran)

No	Tentang	Hari/Tanggal	Nomor
	Bogor, Pemerintah Daerah Kota Depok Tentang Pengembangan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Jabodetabekjur		
14.	Kesepakatan Bersama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kepolisian Polda Metro Jaya tentang Pelayanan Terpadu Dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kamis, 20 Desember 2018	31 Tahun 2018 dan B/MOU-39/XII/2018/Datro

No	Tentang	Hari/tanggal	Nomor Perjanjian
1.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Addendum Perjanjian Kerja Sama Tentang Peningkatan Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi	28 Oktober 2018	Nomor 26 Tahun 2018 dan Nomor 1216 Tahun 2018
2.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tentang Pembangunan Gedung dan Beserta Fasilitas Pendukung Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjung Pasca Gempa Bumi	Rabu, 19 Desember 2018	Nomor 63 TAHUN 2018 dan Nomor 425.1/1559/KLU/2018
3.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bogor Tentang Pembangunan Park and Ride	Kamis, 20 Desember 2018	2018 (sedang dalam proses penomoran
4.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor Tentang Pembangunan Park and Ride	Kamis, 20 Desember 2018	2018 (sedang dalam proses penomoran
5.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi Tentang Pembangunan Park and Ride	Kamis, 20 Desember 2018	2018 (sedang dalam proses penomoran
6.	Perjanjian Kerja Sama Antara	Kamis, 20	2018 (sedang

No	Tentang	Hari/Tanggal	Nomor
	Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tentang Pembangunan Park and Ride	Desember 2018	dalam proses penomoran
7.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dan BPJS Kesehatan Tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	9 Februari 2018	01 Tahun 2018 dan 04/KTR/WIL-IV/0118
8.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan STIKes Kesetiakawanan Sosial Indonesia Tentang Pelayanan dan Kajian Keperawatan, PKL dan PKMD ahli teknologi Laboratorium Medik serta Pengabdian Masyarakat	9 Februari 2018	03 Tahun 2018 dan 15/STIKESOSI/PKS/II/2018
9.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan STIKES Medistra Indonesia Tentang Pelayanan dan Kajian Keperawatan dan Kebidanan serta Pengabdian Masyarakat	31 Januari 2018	02 Tahun 2018 dan 022/STIKES MI/B/I/2018
10.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tentang Pelakasanaan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi Angkutan Umum	19 Februari 2018	818/-084.3 dan HK.201.1.1 PKTJ 2018
11.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Pendawa Properti Indonesia Tentang Penyediaan Fasilitas RPTRA Nomor 1906/-076 dan PPI/20170002/AC/04	01 Februari 2018	453/-072 dan PPI/2018/0001/AC/02
12.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Akademi Keperawatan Royhan Tentang Pelayanan dan Kajian Keperawatan serta Pengabdian Masyarakat	19 Februari 2018	5 Tahun 2018 dan 027/Dir-Ry/II/2018
13.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan	23 Maret 2018	12 Tahun 2018 dan 12.71/MoU-

No	Tentang	Hari/Tanggal	Nomor
	Politeknik Karya Husada Jakarta Tentang Pelayanan dan Kajian Keperawatan dan Kebidanan serta Pengabdian Masyarakat		PKK/Poltek-KHJ/III/2018
14.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Universitas Trisakti Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	28 Maret 2018	10 Tahun 2018 dan 010/KS.00.08/USAKTI/II/2018
15.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PD Dharma Jaya Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu	9 Februari 2018	1170/-072.26 dan Nomor 34.SP.II.2018
16.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Bank DKI Tentang Penyaluran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia Melalui Sarana Kartu Yang Berbasis Teknologi Perbankan di Provinsi DKI Jakarta	2 Maret 2018	01/PKS/DIR/III/2018 dan 1169/-1.846
17.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Darah N.A.T	02 Mei 2018	4575/UTD/V/2018 dan 23 Tahun 2018
18.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Yayasan Dompet Dhuafa dan Yayasan Aksi Cepat Tanggap Tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Kontrak Perorangan di Kelurahan srengseng Kecamatan kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	15 Mei 2018	1287/-1.856 dan 971-1.856.12 dan 1702/-1.856 dan 484/-1.856.12 dan 1422/-1.856.1 dan 991/-1.846.5 dan Nomor 056/PKS/DD.Corsec-Legal/V/2018 dan 122/PER/ACT-DKI/V/2018
19.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kamar Dagang Industri Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pengembangan Bidang Perindustrian dan Energi	26 April 2018	42 Tahun 2018 dan 531/DP/IV/2018

No	Tentang	Hari/Tanggal	Nomor
20.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	7 Mei 2018	12 Tahun 2018 dan B-5829 /0.1/H/8 /2018 dan B/MOU-24/VIIOI/2018/DATRO
21.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kantor Wilayan Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Tentang Pengintegrasian Data Pertanahan	4 Juni 2018	1710/-072 dan 1/SKB/VI/2018
22.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Perkumpulan Gerakan One Kecamatan One Center For Enterpreneurship (OK OCE) Tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu	17 Juli 2018	38 Tahun 2018 dan 021/PGO-PKS/VII/2018
23.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. ICI Paints Indonesia Tentang Pengecatan Kampung Tematik Di Kawasan Kemayoran Administrasi Jakarta Pusat Dalam Rangka Menyambut Asian Games XVIII Tahun 2018	21 Juli 2018	2018 (sedang dalam proses penomoran)
24.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Asian Development Bank Tentang Optimalisasi Penerimaan Daerah	23 Juli 2018	2157/-072 dan 001/CA/ADB-DKI/2018
25.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kantor Wilayan Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta tentang Legalisasi Aset Tanah Masyarakat	4 Juni 2018	1/SKB/VI/2018 dan 39 Tahun 2018
26.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Propan Raya I.C.C. Tentang Program Penataan Kawasan Kota	31 Juli 2018	2045/-071.3 dan 008/EXT-MKT/PSI/VII/18

No	Tentang	Hari/Tanggal	Nomor
	Tua Wilayah Kelurahan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara		
27.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Paiton Energy Tentang Supply Of Solar Electricity Power Stations, Recharging Station And Electric Motocycles	1 Agustus 2018	2117/-072.26
28.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Berau Coal Tentang Penyediaan Stasiun Pengisian Listrik Bertenaga Surya	4 Agustus 2018	48 Tahun 2018
29.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Yayasan Belantara Budaya Indonesia Tentang Pertunjukan Tari Seni Budaya Secara kolosal Pada Acara Torch Relay Asian Games XVIII Tahun 2018	6 Agustus 2018	4036/-1.853.124 dan 027/bbi-event/07.08/2018
30.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Artisan Wahyu (Gandaria City) Tentang Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Di Kawasan Gandaria City Dan Sekitarnya	2 Juli 2018	020.OP/PKS/LGL-AW/GCVII/2018 dan 3612/-072.25
31.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Universitas Indonesia Tentang Praktik Kerja Lapangan, Penelitian Serta Pengabdian Masyarakat Untuk Program Studi Sarjana, Profesi dan Pasca Sarjana Fakultas Farmasi Universitas Indonesia	02 April 2018	16 Tahun 2018 dan 13/PKS/FF/UI/2018
32.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. IAPMO Group Indonesia Tentang Pelayanan Pengujian Produk	30 Juli 2018	205/-072.26 dan 006/MoU-UIB2T/IAPMO/VII/2018
33.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. TUV NORD Indonesia Tentang Pelayanan Pengujian Produk	14 Agustus 2018	206/-072.26 dan 013/R0/PS/VII/2018
34.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Lembaga Sertifikasi Produk PT. Global Inspeksi Sertifikasi Tentang	30 Juli 2018	204/-072.26 dan 012/NK-GIS/UIB2T/VII/2018

No	Tentang	Hari/Tanggal	Nomor
	Pelayanan Pengujian Produk		
35.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Lembaga Sertifikasi Produk PT. Sertifikasi Produk Indonesia Tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Kontrak Perorangan di Kelurahan cengkarang timur Kecamatan cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	30 Juli 2018	203/-072.26 dan SPI/JKT-0001/0718
36.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Carsurin Tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Kontrak Perorangan di Kelurahan rawa buaya Kecamatan cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	30 Juli 2018	207/-072.26 dan 2018/VII/CARS-PEMPROV/AGR-LSPro/144
37.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Link Net, Tbk Tentang Penyelenggaraan Saran dan Isi Siaran Balai Kota Channel	2 Mei 2018	1850/-072 dan PK-049/CSL-LN/DKI/V/18
38.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prof. Moestopo (Beragama) Tentang Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat	09 November 2018	36 Tahun 2018 dan 1477/D/FKG/XI/2018
39.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Yayasan Dharma Suci Tentang Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau di Jalan Jembatan Tiga, Pluit Mas, kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara	20 September 2018	841/-1.795.221 dan 253/YDS/L/IX/18
40.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	28 September 2018	271/PKS/CL/2018 dan 54 Tahun 2018

No	Tentang	Hari/Tanggal	Nomor
	Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Permukiman di Provinsi DKI Jakarta		
41.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Akademi Keperawatan Yayasan Rumah Sakit Jakarta Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Permukiman di Provinsi DKI Jakarta	14 November 2018	37 Tahun 2018 dan 003/Srt.MOU/XI/2018
42.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta Sekolah Tinggi Transportasi Darat Tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengemudi Angkutan UmumBarat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	29 Oktober 2018	6545/-084.21 dan HK.201/9/1/STTD-2018
43.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Ritel Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	4 Oktober 2018	16134/-072 dan SAT-DISPEN.DKIJKT/L&D/PKS/X/2018/430
44.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Midi Utama Indonesia. Tbk Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Ritel Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	4 Oktober 2018	16135/-072 dan SAT-DISPEN.DKIJKT/L&D/PKS/X/2018/430
45.	Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengemudi Angkutan Umum	12-Nov-18	6740/-084.3 dan HK201/2/7PKTJ 2018
46.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Jotun Indonesia Tentang Program Penataan Kolong Jalan Layang Non Non Tol Di Jalan Antyasari Kota Administrasi Jakarta Selatan	9 Maret 2018	2018 (Sedang dalam proses penomoran)
47.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Bank DKI Tentang Program Penataan Kolong Jalan Layang Non	9 Maret 2018	2018 (Sedang dalam proses penomoran)

No	Tentang	Hari/Tanggal	Nomor
	Tol Di Jalan Antyasari Kota Administrasi Jakarta Selatan		
48.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. ICI Paints Indonesia Tentang Program Penataan Kolong Jalan Layang Non Tol Di Jalan Antyasari Kota Administrasi Jakarta Selatan	9 Maret 2018	2018 (Sedang dalam proses penomoran)
49.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tentang Penyelenggaraan Dukungan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Seribu Dan Sekitarnya	28-Sep-18	270/PKS/KL/2018 dan 1944/-072.1
50.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Tentang Penyelenggaraan Edukasi Kesehatan Gerakan Ayo Minum Air Di Sekolah Dasar	19 Desember 2018	21612/-072 dan 02/PK/PP.PERSI/ XII/2018
51.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol Tentang Penanganan Pemulihan Korban Tindak Kekerasan Perempuan Dan Nak Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana Di Taman Impian Jaya Ancol	10 Oktober 2018	002/Dir-PJA/X/2018 dan 4106/-072
52.	Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kantor Wilayan Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Tentang Legalisasi Aset Tanah Masyarakat	Kamis, 20 Desember 2018	02/SKB/XII/2018 dan 62 Tahun 2018
53.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangeran dan Bekasi Tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan Dan Peningkatan Kepatuhan Pemberi Kerja Dalam	Jumat, 21 Desember 2018	64/KTR/Wil-IV/2018

No	Tentang	Hari/Tanggal	Nomor
	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta		
54.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangeran dan Bekasi Tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Kontrak Perorangan di Kelurahan taman sari Kecamatan taman sari Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Jumat, 21 Desember 2018	65/KTR/Wil-IV/2018
55.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Tentang Pengoperasian, Pemeliharaan, Pelatihan Dan Alih Teknologi Pilot Project Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Jumat, 21 Desember 2018	Nomor /PKS/BPPT-DKI JAKARTA/12/2018 Nomor 12666/-1.799.21
56.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tentang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Wilayah Perbatasan	Kamis, 20 Desember 2018	Nomor 8231/-072.31 Nomor
57.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) Tentang Bina Lingkungan Bagi Anak-Anak Anggota Dan Mantan Anggota Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) dengan SMAN 93 Jakarta	05 Juni 2018	8505/-072 dan B/498/VI/2018

No	Tentang	Hari/Tanggal	Nomor
58.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Tentang Bina Lingkungan Bagi Anak-Anak Prajurit Dan PNS Kopassus Dengan SMAN 29, SMPN 103, SDN Baru 01 Pagi, SDN 02 Pagi, SDN Baru 07 Pagi, Dan SDN Cijantung 03 Pagi Yang Berdomisili Di Cijantung Jakarta Timur	05 Juni 2018	8502/-072 dan B/1044/VI/2018
59.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Perhimpunan Purnakaryawan Timah Wilayah Jakarta Dan Sekitarnya Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Putra-Putri/Cucu Kandung Karyawan/Pensiunan Timah Dengan Sekolah-Sekolah Negeri Yang Berdomisili Di Wilayah Komplek Timah Pangkalan Jati Baru Cilandak	05 Juni 2018	8509/-072 dan 14/SK/PPT.WJ&S/VI/2018
60.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Rukun Warga 005 Sukapura Cilincing Jakarta Utara Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Putra-Putri Warga RW 005 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Dengan SMP Negeri 289 Jakarta	05 Juni 2018	8508/-072 dan 765/RW-05/SKP/VI/2018
61.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma Tentang Penyelengggaraan Penerimaan Pendidikan Bagi Putra/Putri Prajurit Dan TNI AU Dengan Sekolah-Sekolah Negeri Yang Berdomisili Di Wilayah Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma	05 Juni 2018	8503/-072 dan SPERJAM/51/V/2018
62.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Bank DKI Tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018 Di	14 September 2018	14964/-072 dan 05/PKS/DIR/IX/2018

No	Tentang	Hari/Tanggal	Nomor
	Provinsi DKI Jakarta		
63.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Bank DKI Tentang Penyaluran Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahun Anggaran 2018 Di Provinsi DKI Jakarta	15 Mei 2018	7461/-072 dan 04/PKS/DIR/2018
64.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Bank DKI Tentang Penyaluran Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SLB, SMP/SMPLB/SATAP, SMA/SMALB DAN SMK Swasta Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018		6346/-072 dan 05.1/PKS/DIR/IV/2018
65.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pangkalan Utama TNI AL III Tentang Bina Lingkungan Bagi Anak-Anak Prajurit dan PNS Pangkalan Utama TNI AL III Dengan SDN Kelapa Gading Barat 01 Yang Berdomisili Di Kelapa Gading Barat Jakarta Utara	05 Juni 2018	8504/-072 dan 01/VI/2018
66.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Rukun Warga 06 Kelurahan Cipinang Melayu Komplek Perumahan TNI AD Jatiwaringin Tentang Bina Lingkungan Bagi Warga Komplek Perumahan Rukun Warga 06 Cipinang Melayu dengan SDN Cipinang Melayu 03 dan 04 dan SMPN 109 Jakarta	5 Juni 2018	8507/-072 dan 03/PPDB/BL.06/VI/2018
67.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Komplek Perwira Angkatan Darat (KPAD) Bulakrantai Tentang Bina Lingkungan Bagi Warga Perumahan Bulakrantai dengan SMPN 20 Jakarta	5 Juni 2018	8510/-072 dan B/18/VI/2018
68.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kostrad Tanah Kusir Tentang Bina Lingkungan Bagi Anak-anak Prajurit dan PNS Kostrad Tanah Kusir	5 Juni 2018	8506/-072 dan 05/VI/2018

No	Tentang	Hari/Tanggal	Nomor
	dengan SMP Negeri 164 Jakarta Selatan		

Sumber : Biro Tata Pemerintahan 2018

Dalam rangka implementasi kerjasama antar daerah sesuai dengan tata cara kerjasama daerah, kepala daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek kerjasama yang disepakati. Apabila menyetujui rencana kerjasama tersebut, para pihak dapat meningkatkan dengan membuat Kesepakatan Bersama/MoU dan ditindaklanjuti dengan menyiapkan rancangan Perjanjian Kerjasama

3. Bidang Kerjasama

Selama Tahun 2018, Provinsi DKI Jakarta melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada berbagai bidang, antara lain sesuai pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.3 Bidang Kerjasama DKI Jakarta dengan Daerah Lain

NO	MITRA KERJA SAMA	DOKUMEN YANG DITANDATANGANI	TANGGAL	NOMOR	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	TAHUN	KETERANGAN
1.	Dirjen SDA Kemen PU Pemprov Jabar Pemkab Bekasi Pemko Bekasi Pemkab Karawang Dirjen SDA Kemen PU Pemprov Jabar Pemkab Bekasi Pemko Bekasi Pemkab Karawang	Kesepakatan Bersama	4/9/2014	No. 19/NKB/D/2014 No. AM.01.09-DC/KSB/14/2014 No. 36 Tahun 2014 No. 119/58/OtdaKsm No. 06/KB.134.4/5/AKS/2014 No. 94 Tahun 2014 No. 073/4106/Pem-Um	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur untuk Wilayah Jakarta, Bekasi dan Karawang	2014	PU
2	Pemerintah Kabupaten Bekasi	Perjanjian Kerja Sama	9/18/2015	5279/-072 800/2997/BOP-DAMKAR/IX/2015	tentang Peningkatan Kompetensi Aparatur Dalam Pencegahan, Penangggulangan, Penyelamatan Dan Pengujian Sarana Proteksi Kebakaran	2015	TRANTIBUMLINMAS

3	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Kota Depok , Pemerintah Daerah Kota Bekasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan	Kesepakatan Bersama	Kamis, 20 Oktober 2016	24 Tahun 2016 050/61/KB/Pem./Huk/2016 134.43/1814-Pem./Setda/2016	Tentang Pembangunan Perluasan Jaringan Jalan Lintas Batas Wilayah Provinsi Dki Jakarta, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	2016	PU
4	Pemerintah Kota Bekasi	Perjanjian Kerja Sama	Senin, 1 Februari 2016	455/-072 367/Damkar	tentang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Wilayah Perbatasan	2016	TRANTIBUMLINMAS
5	Pemerintah Kota Bekasi	Perubahan Perjanjian Kerja Sama	Rabu, 26 Oktober 2016	25 Tahun 2016 444 Tahun 2016	tentang Peningkatan Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi	2016	LH

6	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi	Perjanjian Kerja Sama	Kamis, 20 Oktober 2016	22 Tahun 2016 119/146/BKSP	Tentang Pembangunan Perluasan Jaringan Jalan Lintas Batas Wilayah Provinsi Dki Jakarta Dengan Wilayah Provinsi Jawa Bara Di Kota Bekasi	2016	PU
7	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten	Perjanjian Kerja Sama	Kamis, 20 Oktober 2016	119/147/BKSP 23 Tahun 2016	tentang Pembangunan Dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antara Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dan Provinsi Banten	2016	PU
8	Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Kesepakatan Bersama	Kamis, 20 Oktober 2016	24 Tahun 2016050/61/KB/PEM/HUK/2016	tentang Pembangunan Perluasan Jaringan Jalan Lintas Batas Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	2016	PU
9	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Kesepakatan Bersama	Senin, 10 Juli 2017	Nomor 539/75/SPIBUMD Nomor 7 Tahun 2017	Pembagian Besaran Participating Interest (Pi) 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Offshore North West Java	2017	

10	Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang	Kesepakatan Bersama	Rabu, 23 Agusutus 2017	Nomor 188.600/MOU.6.HUK/2017 Nomor 415.4/3023_KSD/2017	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Energi, Pariwisata, dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten	2017	PU
11	Pemerintah Provinsi Banten	Kesepakatan Bersama	Rabu, 23 Agusutus 2017	Nomor 119/146/BKSP Nomor 435 Tahun 2016	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Energi, Pariwisata, dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten	2017	PU
12	Pemerintah Kota Bekasi	Addendum Perjanjian Kerja Sama	Rabu, 3 Mei 2017	Nomor 4 Tahun 2017 Nomor 224 Tahun 2017	Peningkatan Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi	2017	LH
15	Pemerintah Kabupaten Tangerang	Kesepakatan Bersama	Selasa, 13 Februari 2018	Nomor 2 Tahun 2018 Nomor 417.5/455-KSD	Penyediaan Air Minum Untuk Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	2018	PU
16	Pemerintah Kota Bekasi	Addendum Perjanjian Kerja Sama	Jum'at, 26 Oktober 2018	Nomor 26 Tahun 2018 Nomor 1216 Tahun 2018	Peningkatan Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi	2018	LH

15	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	Perjanjian Kerja Sama	Rabu, 19 Desember 2018	Nomor 63 TAHUN 2018 Nomor 425.1/1559/KLU/2018	Pembangunan Gedung dan Beserta Fasilitas Pendukung Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjung Pasca Gempa Bumi	2018	PENDIDIKAN
17	Pemerintah Kabupaten Tangerang	Perjanjian Kerja Sama	Kamis, 20 Desember 2018	Nomor 8231/-072.31 Nomor	Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Wilayah Perbatasan	2018 (belum ditandatangani)	TRANTIBUMLINMAS
18	Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bogor	Perjanjian Kerja Sama	Kamis, 20 Desember 2018	2018 (sedang dalam proses penomoran	Pembangunan Park and Ride	2018 (sedang dalam proses penomoran	TRANSPORTASI
19	Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor	Perjanjian Kerja Sama	Kamis, 20 Desember 2018	2018 (sedang dalam proses penomoran	Pembangunan Park and Ride	2018 (sedang dalam proses penomoran	TRANSPORTASI
20	Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi	Perjanjian Kerja Sama	Kamis, 20 Desember 2018	2018 (sedang dalam proses penomoran	Pembangunan Park and Ride	2018 (sedang dalam proses penomoran	TRANSPORTASI
21	Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi	Perjanjian Kerja Sama	Kamis, 20 Desember 2018	2018 (sedang dalam proses penomoran	Pembangunan Park and Ride	2018 (sedang dalam proses penomoran	TRANSPORTASI

22	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Depok, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur	Kesepakatan Bersama	Kamis, 20 Desember 2018	2018 (sedang dalam proses penomoran	Pembangunan Sistem Ketahanan Pangan di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur	2018 (sedang dalam proses penomoran	KETAHANAN PANGAN

23	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Depok	Kesepakatan Bersama	Kamis, 20 Desember 2018		Pengembangan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Jabodetabekjur	2018 (sedang dalam proses penomoran	LH
21	Pemerintah Kabupaten Blitar	Kesepakatan Bersama	Senin, 9 Juli 2018	Nomor 14 Tahun 2018 dan 119/I.27/409.05/ 2018	1. Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyediaan Kebutuhan Bahan Pangan; 2. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : Bidang peternakan, Bidang pertanian dan perkebunan; dan Bidang perikanan	2018	KETAHANAN PANGAN PERIKANAN PERTANINA

4. Nama Kegiatan

Kerjasama Gubernur 10 (sepuluh) Provinsi dengan nama Forum Mitra Praja Utama (MPU), yang beranggotakan Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat , dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun visi dan misi kerjasama ini adalah "Mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kemitraan melalui peningkatan kerjasama di bidang ekonomi, kualitas SDM, dan kualitas tenaga kerja". Kerjasama MPU telah melibatkan banyak SKPD/UKPD sepuluh provinsi, masing-masing masuk dalam 4 (empat) tema kerjasama.

Beberapa kegiatan MPU selama Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

I. **Rapat Gabungan FKD-MPU** ke ke XVIII Tahun 2018 yang dilaksanakan pada bulan Marer 2018 Di Provinsi Lampung. Adapun Agenda Rapat Gabungan ini diantaranya:
   1. Pembahasan Draft SKB Peraturan Bersama tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bersama FKD-MPU;
   2. Pembahasan Draf SKB Gubernur Anggota MPU tentang Jaswal Ragab-Rakergub MPU periode tahun 2019-2023;
   3. Pembahasan Draft SKB Gubernur Anggota MPU tentang Program Kegiatan Kerjasama Pembangunan 2018;
   4. Pembahasan Draft SKB Gubernur Anggota MPU tentang Rekomendasi Kepada Pemerintah);
   5. Isu-isu Aktual Lain.

II. Rapat Kerja Gubernur Provinsi Anggota FKD-MPU dengan para Menteri

III. **Rapat Kerja Gubernur FKD-MPU** ke XVIII yang dilaksanakan pada bulan Juni 2018 di Surabaya, dengan agenda rapat yaitu:

1. Kelompok Kebijakan membahas Naskah Keputusan Bersama;
2. Kelompok Teknis dengan SKPD/UKPD yang terkait yang mempunyai Program Kerja Sama Tahun 2019 melakukan rapat kecil;
3. Dialog Interaktif diikuti oleh semua peserta Rakergub FKD-MPU
4. Isu-isu aktual lain.

b. Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur), yang didirikan tahun 1976 (saat itu masih meliputi Jabotabek).

Kerja Sama Pembangunan Jabotabek telah berkembang dengan masuknya Kabupaten Cianjur dan Kota Tangerang Selatan ke dalamnya. Hal ini terjadi setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur tentang Kerjasama antar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Cianjur pada tanggal 16 Juni 2005 yang diketahui oleh Menteri Dalam Negeri.

Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabotabek sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kerja Sama Pembangunan Jabotabek. Guna

mengaktualkan BKSP Jabodetabek sesuai dengan perkembangan daerah dan permasalahannya, maka Kepmendagri tersebut diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur).

c. Kerjasama bilateral dengan provinsi dan kabupaten lain dalam rangka penyelenggaraan program transmigrasi untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk dan pengurangan kemiskinan melalui pembangunan kawasan produksi baru di daerah tujuan transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat trans dan masyarakat sekitar lokasi transmigrasi.

d. Kerjasama dengan pihak ketiga, baik dengan kementerian, lembaga pusat non kementrian, pt, bumd, yayasan dalam rangka memenuhi kebutuhan barang atau jasa pemerintah provinsi dki jakarta, seperti KEMENTERIAN, BPJS KESEHATAN, BPJS KETENAGAKERJAAN, KEPOLISIAN DAERAH METRO JAKARTA RAYA, KEJAKSAAN TINGGI, BPK DAN PEMBANGUNAN, LKPPJ, KANWIL BPN, PERGURUAN TINGGI NEGERI, PERUSAHAAN

e. Forum APPSI dan APEKSI adalah forum pemerintah provinsi dan kota otonom, dimaksudkan sebagai wadah penyampaian saran dan masukan kepada pemerintah terkait dengan perimbangan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun sebagai tempat berbagi pengalaman dan pengetahuan antar daerah dalam menangani masalah di daerah dan merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk mengambil langkah sesuai hasil rekomendasi yang disampaikan.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama Antar Daerah secara administrasi diselenggarakan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di

Bagian Kerjasama Daerah. Secara teknis, pelaksanaan isi perjanjian kerjasama dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai **Bagian Kerjasama Daerah** Biro Tata Pemerintahan pada akhir Desember 2018 sebanyak 12 (dua belas) orang.

Tabel 6.4 Rekapitulasi Pegawai Bagian Kerjasama Daerah Biro Tata Pemerintahan

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	**Golongan**	**13**	
	• Golongan IV	1	
	• Golongan III	9	
	• Golongan II	2	
	• Golongan I	-	
B.	**Eselon**	**12**	
	• Eselon III	1	
	• Eselon IV	3	
	• Pelaksana (Staf)	8	
C.	**Pendidikan**	**12**	
	• S2	6	
	• S1	3	
	• Diploma	2	
	• SLTA	1	

Sumber : Biro Tata Pemerintahan, 2018

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

~~Pada tahun 2015 Bagian Kerjasama Daerah Biro Tata Pemerintahan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 1.480.000.000.~~

8. Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu kerja sama telah ditetapkan dalam naskah kerja sama oleh kedua belah pihak. Apabila jangka waktu kerja sama berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan bersama.

Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek didirikan sejak 1976 dan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU)

masih berjalan hingga saat ini. Kerjasama bilateral dibidang transmigrasi berjangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan dengan pihak ketiga disesuaikan dengan kebutuhan kerjasama. Adapun dengan forum APPSI dan APEKSI merupakan keanggotaan tanpa batas waktu kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan

9. Hasil Dari Kerjasama

Kerjasama daerah telah menghasilkan beberapa manfaat, baik bagi Provinsi DKI Jakarta maupun bagi daerah mitra kerjasama. Bagi Provinsi DKI Jakarta, hasil dari kerjasama daerah antara lain sebagai berikut.

a. Terpenuhinya pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat berupa hasil pertanian dan peternakan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi, mengurangi dampak sosial dan mobilitas penduduk serta pengembangan SDM dan SDA.
b. Tertampungnya peserta transmigrasi asal DKI Jakarta di daerah tujuan.
c. Semakin meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam penataan ruang, tata air, transportasi, permukiman, persampahan, penanganan banjir dan lingkungan hidup di kawasan Jabodetabekjur.
d. Terdapatnya berbagai aplikasi guna mendukung pelayanan masyarakat.
e. Terlaksananya Pengembangan Aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dan Pengabdian Masyarakat.

10. Permasalahan dan Solusi

Implementasi dari kerjasama daerah antara lain terhambat oleh banyak faktor, antara lain; kesiapan anggaran di daerah mitra kerja sama, koordinasi internal para pihak dan dukungan administrasi. Untuk mengurangi dan mensinergikan pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta secara rutin mengikuti agenda-agenda pertemuan forum kerjasama dan memberikan bantuan keuangan khususnya dengan kawasan sekitar Jakarta yang telah memiliki keterkaitan secara fisik dan ruang, ekonomi, sosial, maka pemberian bantuan keuangan kepada daerah Bodetabekjur. Selain itu, diberikan pulan hibah kepada hibah Sekretariat BKSP Jabodetabekjur untuk Operasional Sekretariat BKSP, yang digunakan untuk mendukung sekretariat dalam menjalankan tugas-tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi program/kegiatan kerjasama agar dapat tercapai harapan bersama pemda se-Jabodetabekjur.

Adapun Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Bodetabekjur diberbagai sektor pembangunan dalam keterpaduan, keserasian, keterpaduan dan keselarasan pembangunan wilayah sekitar Jakarta dalam rangka mendukung Jakarta sebagai Ibukota Negara. Untuk tahun 2018 diutamakan dalam rangka penanganan banjir, lingkungan hidup, infrastruktur, yang besarannya disesuaikan dengan kepentingan Jakarta dan daerah sekitar.

Adapun perkembangan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Bodetabekjur adalah sebagai berikut :

Tabel 6.5 Belanja Hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Jabodetabekjur Tahun 2018

NO	TAHUN	PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH
1	2018	PEMKO BERKASI	94,800,781,100.00
2	2018	PEMKAB BOGOR	10,397,584,407.00
3	2018	PEMKO BOGOR	8,107,960,000.00
4	2018	PEMKO DEPOK	25,594,000,000.00
	TOTAL		**238,900,325,507.00**

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Prov. DKI Jakarta, 2018

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Mitra Yang Diajak Kerjasama

a. Pihak ketiga yang diajak kerjasama adalah perusahaan-perusahaan sebagai berikut :

1) **Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) d/h Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP)**

a) PT. Bakrie Investindo
b) PT. Metropolitan Kencana
c) PT. Langgeng Ayom Lestari
d) Yayasan Sapta Nawami Bhakti
e) PT. Duta Pertiwi
f) PT. Kempas Indah Indonesia
g) PT. Roint Eka Jaya
h) PT. Pacific Bangun Mas
i) PT. Dharma Alumas Sakti
j) PT. Bina Citra Tataswati
k) PT. Bumi Grafika Jaya
l) PT. Pacific Prima Buana Mas
m) PT. ABG Tuna
n) PT. Gading Raya Propertindo
o) PT. Duta Masa Nusa
p) PT. Perwita Margasakti
q) PT. Hotel Cikini Realty
r) PT. Grand Indonesia

2) **Badan pengelola Keuangan Daerah (BPKD)**

a) Yayasan Pendidikan Tiara Kasih
b) Yayasan Pendidikan Tunas Muda
c) PT. Fajar Setia Mandiri
d) Yayasan Patmos
e) Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia
f) PT. Pesona Marga Mandiri
g) Yayasan Pendidikan Katolik Mardi Luhur
h) Yayasan Bukit Sion
i) PT. Gama Investasi Lestari
j) PT. Wahana Sejahtera
k) Yayasan Tugasku
l) Gereja Protestan Minahasa Sidang Yeremia Jakarta
m) Yayasan Al-Muhajirin Kelapa Gading
n) Gereja Bethel Indonesia Jemaat Ecclesia
o) Yayasan Pendidikan Pembangunan Bangsa
p) Yayasan Darul Ma'arif

3) **Gubernur Provinsi DKI Jakarta**

PT. Wahana Nusantara

2. Dasar Hukum

Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga sebagian besar menyangkut pengelolaan/pemanfaatan asset daerah. Untuk itu, kerjasama dengan pihak ketiga berpedoman pada :

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pada Pihak Ketiga;
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;.

3. Bidang Kerjasama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :

a. Sewa

Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

SKPD/UKPD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

b. Pinjam Pakai

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.

c. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) / (BOT/BTO)

Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS/BOT adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG/BTO adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Tabel 6.6 Aset Kerjasama dengan pihak ketiga bentuk BOT/BTO

No.	Nama SKPD & Pihak Ketiga	Jenis Aset	Keterangan
A.	**BP BUMD d/h BPMP**		
1	PT. Bakrie Investindo	Tanah	GOR Sumantri Kuningan
2	PT. Metropolitan Kencana	Jembatan	JPO Multoguna PIM 1 dan 2
3	PT. Langgeng Ayom Lestari	Tanah Terminal	Blok M
4	Yayasan Sapta Nawami Bhakti	Tanah	Rumah Sakit Hewan
5	PT. Duta Pertiwi	Jembatan	JPM JITC & Gd Dusit Mangga Dua
6	PT. Duta Pertiwi	Jembatan	JPO Harco Madu & Gedung Mangga Dua

7	PT. Duta Pertiwi	Jembatan	Jembatan Mutiguna Mangga Dua
8	PT. Kempas Indah Indonesia	Jembatan	JPM Pasar Pagi dan Mall Madu
9	PT. Roint Eka Jaya	Jembatan	JPO Grosit Tanah Abang
10	PT. Pacific Bangun Mas	Jembatan	JPO Pasar Cipulir jaksel
11	PT. Dharma Alumas Sakti	Gedung	GOR Sumantri Kuningan
12	PT. Bina Citra Tataswati	Jembatan	JPO Pertokoan Glodok
13	PT. Bumi Grafika Jaya	Tanah	Pengembangan BUMD
14	PT. Pacific Prima Buana Mas	Tanah Bangunan Toko dan SRO	Jl. Bekasi Barat Raya Jaktim
15	PT. ABG Tuna	Jembatan	Pelelangan Ikan Muara Angke
16	PT. ABG Tuna	Jembatan	Jl. Dermaga Kav. I Pluit
17	PT. Gading Raya Propertindo	Jembatan	JPO Psr Regional Tanah Abang
18	PT. Duta Masa Nusa	Jembatan	JPO Jl. KS Tubun
19	PT. Perwita Margasakti	Jembatan	JPO Mall Ambasador
20	PT. Hotel Cikini Realty	Tanah	Hotel Cikini Raya
21	PT. Grand Indonesia	Jembatan Multiguna	Jembatan Multiguna Jl. Teluk Betung Tanah Abang
B.	**BPKD**		
1	Yayasan Pendidikan Tiara Kasih	Tanah Sekolah	Kalideres Jakarta Barat
2	Yayasan Pendidikan Tunas Muda	Tanah Sekolah	Kedoya Selatan
3	PT. Fajar Setia Mandiri.	Tanah Tanah SPBU	Jl. DI Panjaitan Jaktim
4	PT. Fajar Setia Mandiri	Tanah Tanah SPBU	Jl. Danau Sunter Jakut
5	Yayasan Patmos	Tanah Sekolah	Taman Meruya iIir Blok E7 Jakbar
6	Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia	Tanah Sekolah	Perumahan Buana Blok L4 Jakbar
7	PT. Pesona Marga Mandiri	Tanah	Jl. Petak Baru Pasar Pgi
8	Yayasan Pendidikan Katolik Mardi Luhur	Tanah Sekolah	Taman Alfa Indah Blok A9 Jakbar
9	Yayasan Bukit Sion	Tanah Sekolah	Taman Kebon Jeruk Blok G VII Jakbar
10	PT. Gama Investasi Lestari	Tanah	Komplek Bola Basket Kelapa Gading
11	PT. Wahana Sejahtera	Tanah	Terminal Transit Ciilitan
12	Yayasan Tugasku	Tanah	Jl. Pulo Mas Jakarta Timur
13	Gereja protestan Minahasa Sidang Yeremia Jakarta.	Gereja	Blok HF 4 Kelapa Gading Barat
14	Yayasan Al-Muhajirin Kelapa Gading	Mesjid	Jl. Pendet Kelapa Gading
15	Gereja Bethel Indonesia	Gereja	Taman Semanan Indah Blok

	Jemaat Ecclesia		NA 1 Jakarta Barat
16	Yayasan Pendidikan Pembangunan Bangsa	Sekolah	Jl. Swadaya Duren Sawit Jaktim
17	Yayasan Darul Ma'arif	Mesjid	Jl. Lembah Aren Blok K3 Pondok Kelapa jaktim
18	PT. Jaya Real Property	Tanah Jalan	Jembatan Penyeberangan Multiguna di Daerah Senen Jakarta Pusat
C.	**GUBERNUR DKI JAKARTA**		
1.	PT. Wahana Nusantara	Gedung Kantor	Jl. H.R Rausuna Said Kav. C22, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

Sumber BPAD, 2018

Tabel 6.7 Aset Kerjasama dengan Pihak Ketiga Bentuk Sewa

No.	Nama SKPD & Pihak Ketiga	Jenis Aset	Keterangan
A.	**BPAD PROV. DKI JAKARTA**		
1	PT. Evi Asia Tenggara	Tanah dan Bangunan	Co Working Space, Jl. Prof. DR. Satrio No. 7, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
2	Yayasan Al-Huda Kelapa Gading	Tanah	Sarana Ibadah dan Sarana Pendidikan, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara
3	Yayasan Pendidikan Kristen Tiara Kasih	Tanah	Co Working Space, Jalan Dharma Raya Blok C1-2, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Kota Adm Jakarta Barat
4	PT. Gerak Maju Abadi	Tanah dan Bangunan	Sarana Ibadah Dan Sarana Pendidikan, Jalan Blustru Glodok Rt. 001 Rw. 006 Kel. Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat
5	Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kedoya	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Jalan Angsana Raya Blok D8, Kelurahan Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat
6	PT. Lingkar Seni Indonesia	Tanah dan Bangunan	Gedung Pertokoan Dan Lahan Parkir, Jalan Teuku Umar Nomor 1, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Adm Jakarta Pusat
7	Yayasan Suhargo Gondokusumo	Tanah dan Bangunan	Sarana Ibadah Gereja, Perumahan Taman Surya Blok Mm2, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat
8	PT. Bank DKI	Bangunan	Kantor Operasional Bank Dki, Jl. Suryo Pranoto Nomor 8, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat
9	Yayasan Muslim Bojong Indah	Tanah dan Bangunan	Sarana Ibadah, Jalan Belimbing Raya Blok B.5 Komp. Perum. Bojong Indah, Jak-Bar
10	Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Tanah dan Bangunan	Kantor di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi
11	PT. Bank DKI	Sebagian	Kantor Operasional Bank DKI, Lantai 1 S.D 3

		Tanah dan Bangunan	Gedung Balaikota Blok D, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat
12	PT. Bank DKI	Sebagian Tanah dan Bangunan	Ruang ATM dan Mesin EDC, 82 (delapan puluh dua) Kelurahan tahap II dan 105 (seratus lima) Kelurahan tahap III
13	Yayasan Permata Indonesia Permai	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Perumahan Tugu Permai Jl. H. Murtadho Blok B RT 007 RW 002, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Kota Adm. Jakarta Utara
14	Gereja Tiberias Indonesia	Tanah dan Bangunan	Sarana Ibadah, Jl. Kelapa Nias Raya Blok HT 60, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara
15	Yayasan Harapan Bangsa	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Perumahan Bisma Setjen Dewan Hankamnas Blok B8, Blok C6, dan Perumahan Sunter Garden Blok B7, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara
16	PT. Jakarta Propertindo	Tanah	Pembangunan Pengelolaan Sampah di Dalam Kota (Intermediate Treatment Facility) Jl. Sunter Permai Raya/Jl. Danau Sunter Barat, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara
17	Yayasan Masjid At-Taqwa	Sebagian Tanah	Sarana Ibadah, Jl. H. Murtadho Blok B 10 RT 007 RW 002, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Kota Adm. Jakarta Utara
18	PT. Sinergi Bangun Global	Tanah	Lokasi Perparkiran, Jl. Abdul Rahman Saleh 1, Kel. Senen, Kec. Senen, Kota Adm. Jakarta Pusat
C.	**BPKD PROV. DKI JAKARTA**		
1	PT. Happyday Utama Indonesia	Sebagian Tanah dan Bangunan	Restoran, Jl. H. Djuanda Nomor 19 Kota Administrasi Jakarta Pusat
2	PT. Lingkar Seni Indonesia	Tanah dan Bangunan	Galery Budaya Dan Kunstring, Jl. Teuku Umar No. 1 , Menteng Jakarta Pusat
3	Dewan Kerajinan Nasional Daerah	Sebagian Bangunan dan Kendaraan	Ruang Pameran, Lantai Dasar Blok G Gedung Balai Kota Provinsi Dki Jakarta
4	Yayasan The Gandhi Memorial International School	Tanah	Sarana Pendidikan, Jl. Parang Tritis Vi Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara
5	Yayasan Pendidikan Elka	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah Dasar, Perum Klp Gading Permai Dan Perum Sunter Hijau Jakarta Utara
6	Yayasan Purna Bhakti Abdi Negara	Tanah dan Bangunan	Poliklinik Kesehatan Dan Sarana Olahraga, Perumahan Taman Pegangsaan Indah Dan Perumahan Gading Griya Lestari, Kecamatan Kelapa Gading Kota Adm. Jakarta Utara
7	Prima Indo Bahari	Sebagian Tanah	Coldstorage / Pembekuan Ikan, Penjaringan Jakarta Utara
8	Yayasan Al-Amanah Sunter Agung	Bangunan	Sarana Pendidikan, Jl. Sunter Karya Selatan Iv, Blok H, Rt 02 Rw 03, Kel. Sunter Agung Kec. Tj. Priok, Kota Adm. Jakarta Utara

9	RS Atmajaya	Tanah dan Bangunan	Balai Kesehatan, Rusunawa Penjaringan Jakarta Utara
10	Yayasan Mahatma Gading	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Perum. Villa Gading Indah Blok D Kel. Klp Gading Jakarta Utara
11	Yayasan Al-Hidayah	Tanah	Sarana Ibadah, Jalan Tari Klasik, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara
12	PT. KMC Indonesia	Tanah	Arena Olahraga, Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok
13	Koperasi Pembina Profesi dan Olahraga Perairan (KPPOP)	Tanah	Arena Olahraga, Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok
14	Yayasan Masjid Al-Musyawarah	Sebagian Tanah dan Bangunan	Sarana Ibadah, Jalan Raya Boulevard Kelapa Gading Blok B2 Kelurahan Kelapa Gading Timur
15	Koperasi Perikanan Mina Jaya	Sebagian Tanah	Stasiun Pengisian Solar, Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kel. Pluit Kec. Penjaringan
16	Yayasan Al-Hikmah Sunter Jaya	Tanah dan Bangunan	Sarana Ibadah, Jl. Agung Timur 8 Blok O2, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok
17	Yayasan Pusat Pelatihan E & P	Tanah	Sarana Pendidikan, Blok 1.1. Perumahan Permata Buana, Kel. Kembangan Jakarta Barat
18	Yayasan Pusat Pelatihan E & P	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Perumahan Permata Buana Blok 1.1 Kel. Kembangan Utara, Jakarta Barat
19	Antilope Madju Puri Indah	Tanah dan Bangunan	Sarana Perdagangan (Pasar Tradisional), Jl. Puri Indah Raya Kompleks Perum. Puri Indah, Kembangan Jakarta Barat
20	Palang Merah Indonedia Cabang Jakarta Barat	Tanah dan Bangunan	Sarana Perkantoran, Eks. Kantor Dinas Tenaga Kerja
21	Yayasan Pendidikan Kemurnian	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Blok B. 6 Dan A3 Perum Citra Ii Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat
22	Yayasan Putera Bahagia	Tanah dan Bangunan	Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Dan Sarana Pendidikan, Desa Palasari Kec. Pacet, Jawa Barat
23	PT. T. Energy	Sebagian Tanah	SPBG Busway, Jl. Raya Pondok Gede Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Kramat Jati Jakarta Timur
24	Yayasan Perguruan Rakyat	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Jl. Lampiri Raya No. 28 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur
25	Yayasan Dharma Siswa	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Blok B Perum. Pulo Gebang Permai, Pulo Gebang Jakarta Timur
26	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Sebagian Tanah dan Bangunan	Kantor Pelayanan, Kompleks Perkantoran Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI)
27	Yayasan Baitul Muhajirin	Tanah	Mesjid, Kavling Dki Phase I Blok I, Kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit Jakarta Timur
28	DPP Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia	Sebagian Gedung	Kantor Sekretariat, Jl Hr Rasuna Said Kav. 22 C Karet Kuningan Kecmatan Setia Budi Jakarta Selatan

	(DPP PAMMI)		
29	PT. Satria Cipta Perkasa	Sebagian Tanah	SPBG, Jl. Mayjen Sutoyo No 1 Kel. Kebon Pala Kec. Makasar Jaktim
30	Yayasan Pendidikan Dakwah Islam Al-Falah Pondok Kelapa	Tanah dan Bangunan	Balai Pertemuan Wagra, Perumahan Taman Alfa Indah Blok G1, Kota Administrasi Jakarta Barat
31	Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah	Tanah dan Bangunan	Sarana Ibadah Dan Penunjang Pendidikan, Komplek Perumahan Taman Duta Mas, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat
32	PT. Bumi Bintang Bersatu	Tanah dan Bangunan	Sarana Olahraga Dan Balai Pertemuan, Komplek Perumahan Taman Duta Mas, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat
33	Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat "Wijaya Kusuma"	Sebagian Bangunan	Koperasi Pegawai, Kantor Walikota Jakarta Barat
34	PT. Swadaya Niaga Jaya (Smesco's)	Tanah dan Bangunan	Pusat Promosi Kopi Nusantara, Jl. Kh. Mas Mansyur, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat
35	Swadaya Panduartha	Tanah	Sport Center, Jl. Kumala Artha Gading Blok D-11, Kota Adm. Jakarta Utara
36	Yayasan Al Muhajirin Pondok Kopi	Tanah dan Bangunan	Sarana Ibadah, Jl. Pondok Kopi V Blok E2 Dan Blok E7 Kel. Pondok Kopi Duren Sawit
37	PT. Setia Utama Island	Tanah	Pendistribusian Listrik, Pulau Tengah, Pulau Pari, Kec. Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
D.	**BPKAD DAERAH PROV. DKI JAKARTA**		
1	Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Puri Indah	Tanah	Koperasi Pegawai, Jalan Pulau Pantara IV Blok N2 Perum Permata Buana, Kel. Kembangan Utara
2	PT. Gagas Energi Indonesia	Sebagian Tanah	Pengoperasian Mobile Refuelling Unit (Mru) Beserta Infrastruktur Pendukungnya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat
3	PT. PLN Persero	Sebagian Lahan	Gardu PLN, Jl. Sriwijaya Raya No. 47, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm Jakarta Selatan
4	Yayasan Abdi Karya (Yadika)	Tanah	Sarana Pendidikan, Blok Ee4, Perumahan Taman Ratu Indah, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat
5	PT. Holcim Beton	Sebagian Tanah	Pengelohan Semen Beton, Jalan Ketel I, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara
6	PT. Swarna Jaya Sejahtera	Sebagian Tanah	Spbu, Kawasan Dermaga Pelabuhan Penumpang Kaliadem Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
7	Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-	Tanah	Masjid, Komplek Perumahan Karyawan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

	Falah		Blok M Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur
8	UD. Lautan Mutiara	Sebagian Tanah dan Keseluruhan Bangunan	Coldstorage, Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
9	Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara	Tanah dan Bangunan	Kantor, Jalan Melur I/4 Rt.006/013, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara
10	Yayasan Diannanda (SD)	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Blok N-3, Perumahan Citra Garden Ii, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat
11	Yayasan Pendidikan Pelita Harapan	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Perum. Daan Mogot Baru Blok Na , Jl. Bedugul Kel. Kalideres Jakarta Barat
12	Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Dki Jakarta	Sebagian Ruangan	Kantin, Di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Kantor Samsat Kota Administrasi Jakarta Pusat Dan Utara, Kantor Samsat Kota Administrasi Jakarta Barat, Kantor Samsat Kota Administrasi Jakarta Timur
13	PT. Surya Jaya Mandiri	Sebagian Bangunan	Mini Market, Bangunan Tempat Penyeberangan Orang (Tpo) Kota Yang Terletak Di Jalan Pintu Besar Utara, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari
14	Yayasan Meek Nusantara	Sebagian Bangunan	Sarana Pendidikan, Sebagian Bangunan Ruang Kelas Sdn Marunda 02 Yang Terletak Di Jalan Marunda Pulo Rt 003 Rw 007, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara
15	Yayasan Pendidikan Rasa Sayang Mandiri	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Tanah Dan Bangunan Sarana Pendidikan Untuk Tk, Sd Dan Smp Yang Terletak Di Perumahan Taman Ratu, Blok F-7 Dan Blok F-13 No. 2, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat
16	Yayasan Al-Ikhwan Meruya	Tanah	Sarana Pendidikan, Taman Meruya Ilir Utara, Blok I-8, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat
17	Yayasan Haleluya Jakarta	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Perumahan Citra Garden Ext 1, Blok. Ae-4, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat
18	Yayasan Pelita Bangsa	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Perumahan Citra 5, Blok E-7 Citra Garden City, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat
19	PT. Bank DKI	Sebagian Tanah dan Bangunan	ATM Dan Loket Bank, 22 Kelurahan 5 Wilayah Kota Administrasi Provinsi Dki Jakarta
20	PT. Bank DKI	Sebagian Tanah dan Bangunan	ATM Dan Loket Bank, 58 Kelurahan 5 Wilayah Kota Administrasi Provinsi Dki Jakarta

21	PT. Bank DKI	Sebagian Tanah dan Bangunan	Kantor Operasional, Lantai Dasar Blok C Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jl. Tanah Abang I Nomor 1, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat
22	PT. Jaya Sejati Dua	Sebagian Tanah dan Bangunan	Docking Kapal Nelayan, Jalan Mandala Bahari Nomor 5, Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
23	PT. Indocater	Tanah	Jaringan Distribusi Kabel Listrik Bawah Laut, Pulau Kaliage, Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
24	Yayasan El Shaddai Jakarta Barat	Tanah dan Bangunan	Sekolah, Komplek Perumahan Citra 5, Blok A-6, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat
25	PT. Badra Abadi Perkasa	Tanah	Parkir, RSKD Duren Sawit Jalan Duren Sawit Baru No. 2 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur
26	PT. Usaha Cerah Berjaya Indonesia	Tanah dan Bangunan	Café, Areal Rsud Koja, Jalan Deli Nomor 4 Rt. 012, Rw. 007, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara
27	Yayasan Pondok Karya Pembangunan	Sebagian Tanah dan Bangunan	Sekolah, Jalan Raya Pkp, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur
28	PT. Unggul Dian Perkasa	Sebagian Tanah	SPBG, Terminal Pulo Gebang Kota Administrasi Jakarta Timur
29	Yayasan Tanimbar Lestari	Tanah	Sekolah, Komplek Perumahan Citra I Ext. Blok Aa-5, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat
30	Yayasan Pendidikan Citra Adhi Pratama	Sebagian Tanah	Sekolah, Jalan Outer Ring Road Kayu Besar Nomor 1, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat
31	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sebagian Tanah dan Bangunan	ATM, RSUD Budhi Asih, RSUDPasar Rebo Dan RSKD Duren Sawit
32	PT. Usaha Cerah Berjaya Indonesia	Sebagian Tanah dan Bangunan	Restoran/Café, Rsud Tarakan Di Jalan Kyai Caringin Nomor 7, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat
33	PT. Bank DKI	Tanah dan Bangunan	Kantor Operasional, Lantai 1 S/D 3 Gedung Prasada Sasana Karya, Jalan Suryo Pranoto Nomor 8, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Adminiistrasi Jakarta Pusat
34	PT. Pertamina Gas	Ruang Bawah Tanah	Penempatan Pipa Transmisi Gas, Areal Pergudangan Jalan Tongkol (Krapu) Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara
35	Yayasan Safa Marwah	Tanah dan Bangunan	Masjid, Jalan Muzdalifah, Komplek Perumahan Qarya Thayyibah, Blok B, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat
36	Yayasan Kanker	Tanah dan	Kantor, Jalan Kramat Sawah, Kelurahan

	Indonesia Provinsi Dki Jakarta	Bangunan	Paseban, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat
37	PT. Seabreez Indonesia	Sebagian Tanah dan Bangunan	Café, Areal RSUD Koja, Jalan Deli Nomor 4, Rt.012 Rw 007, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara
38	Yayasan Anak Bangsa Basmol	Tanah dan Bangunan	Sekolah, Jalan Tanggul Cengkareng Drain Nomor 1 Basmol, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat
39	Yayasan El Shaddai Jakarta Barat	Tanah dan Bangunan	Sekolah, Komplek Perumahan Citra 5, Blok D-6, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat
40	PT. Trust Parking Indonesia	Halaman dan Basement	Lahan Parkir, Jl. Kyai Caringin, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat
41	PT. Diansyah Dinamika Warna	Sebagian Tanah dan Bangunan	Kantin, Jl. Kyai Caringin No. 7, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat
42	Koperasi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	Sebagian Tanah dan Bangunan	Koperasi, Fotocopy Dan Kantin, Jl. Kyai Caringin No. 7, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat
43	PT. Gagas Energi Indonesia	Sebagian Tanah	Pengisian Bahan Bakar Gas, Jl. Kyai Tapa/Jalan Dr. Soesilo Raya, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat
44	Yayasan Suhargo Gondokusumo	Tanah dan Bangunan	Sekolah (SMP dan SMA Mentari), Jl. Paradise Boulevard Utara, Blok Paradise 16, Komplek Perumahan Taman Surya 5, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat
45	Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Dki Jakarta	Sebagian Tanah dan Bangunan	Galeri, Jalan Taman Fatahillah Nomor 1, Kawasan Museum Fatahillah/Kawasan Kota Tua, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat
46	PT. Nusantara Sejahtera Raya	Tanah dan Bangunan	Bioskop, Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jl. Cikini Raya No. 73, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat
47	PT. Pembangunan Jaya Ancol	Tanah dan Bangunan	Perluasan Kantor Dufan, Kel. Ancol. Kec. Pademangan, Jakarta Utara
48	Koperasi Pegawai Dinas Perikanan DKI Jakarta	Sebagian Tanah	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Bunker (SPBB)
49	PD. Sumber Alam	Tanah	Usaha dan Gudang Perbekalan, Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara
50	PT. Astra Daihatsu Motor	Tanah	Jembatan Penyebrangan Orang dan Barang, Ruang Publik (Udara), Jl. Gaya Motor, Kota Adm. Jakarta Utara
51	Yayasan Harapan Bangsa	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Blok A.6, Perumahan Citra 3 Ekstension, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat
52	Yayasan Pendidikan Cengkareng 1	Tanah dan Bangunan	Sarana Pendidikan, Kawasan Rumah Susun Cengkareng No.2, Kel. Cengkareng Timur, Kec.

			Cengkareng
53	PT. Petross Gas	Sebagian Tanah	SPBG, Pool Bus Trans Jakarta Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur dan Terminal Rawa Buaya Jl. Lingkar Luar Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat
54	PT. Multi Kontrol Nusantara	Sebagian Bangunan	Pemasangan Antena Parabola, Jl. H.R Rasuna Said Kav.C-22, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan
55	Koperasi Serba Usaha “Ceger Jaya”	Tanah dan Bangunan	Koperasi, RT 001/02, Kel. Ceger, Kec. Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur
56	Yayasan Rumah Bersalin Bidadari Mulia	Tanah	Rumah Bersalin, Jl. Otista Raya No. 64, Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur
E.	**DINAS KEHUTANAN PROV. DKI JAKARTA**		
1	PT. Aetra Air Jakarta	Sebagian Tanah	Pompa Reservoir Dan Instalasi Pompa Tekan, Jl. Sunter Permai Raya/Jl. Danau Sunter Barat, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara
2	Royal City Hotel	Sebagian Tanah	Hotel, Jl. Tomang Raya No. 88, Cideng, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat
F.	**DKPKP PROV. DKI JAKARTA**		
1	Koperasi Pegawai Negeri Dinas Perikanan Provinsi Dki Jakarta	Sebagian Tanah	Perbaikan Dan Perawatan Kapal Ikan Dan Kapal Lainnya (Docking Kapal), Jalan Mandala Bahari Nomor 1 , Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara.
2	PT. Gabungan Samudera Internasional	Sebagian Tanah	Pengolahan Ikan Dan Gudang Pendingin Ikan (Cold Storage), Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
3	PT. Sanjaya Internasional Fishery	Sebagian Tanah	Pengolahan Ikan Dan Gudang Pendingin Ikan (Cold Storage), Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
4	UD. Mina Sari	Sebagian Tanah	Pengolahan Ikan Dan Gudang Pendingin Ikan (Cold Storage), Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
5	PT. Karya Syukur Maju Bersama	Sebagian Tanah	Perbaikan Dan Perawatan Kapal Ikan Dan Kapal Lainnya (Docking Kapal), Jalan Mandala Bahari Nomor 3, Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke,Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara

6	PT. Aman Samudera Indonesia	Sebagian Tanah	Penyimpanan, Pembekuan Dan Pengolahan Ikan (Coldstorage), Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jl. Pendaratan Ikan, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara
7	PT. Marcelindo Citra Lestari	Sebagian Tanah	Penyimpanan, Pembekuan Dan Pengolahan Ikan (Coldstorage), Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jl. Pendaratan Ikan, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara
8	PT. Yoma Mina Sejahtera	Sebagian Tanah	Penyimpanan, Pembekuan Dan Pengolahan Ikan (Coldstorage), Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jl. Dermaga Muara Angke/Jl. Pendaratan Ikan Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara
9	PT. Fan Marina Shipyard & Co	Sebagian Tanah	Tempat Perbaikan Dan Perawatan Kapal Ikan Dan Kapal Lainnya (Docking Kapal), Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jl. Mandala Bahari No.3, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara
10	PT. Alam Segar Jaya	Sebagian Tanah	Penyimpanan, Pembekuan dan Pengolahan Ikan (Coldstorage) dan Gudang, Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jl. Pendaratan Ikan, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara
11	PT. Global Samudra Makmur	Sebagian Tanah	Penyimpanan, Pembekuan dan Pengolahan Ikan (Coldstorage), Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jl. Dermaga Muara Angke / Pendaratan Ikan, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara
12	CV. Anugrah Andalan Nelayan	Sebagian Tanah	Penyimpanan, Pembekuan dan Pengolahan Ikan (Coldstorage), Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jl. Dermaga Muara Angke / Pendaratan Ikan, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara
13	PD. Sumber Mina Rejeki	Sebagian Tanah	Penyimpanan, Pembekuan dan Pengolahan Ikan (Coldstorage), Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jl. Dermaga Muara Angke / Pendaratan Ikan, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara
14	CV. Samudra Pasific Fishindo	Sebagian Tanah	Penyimpanan, Pembekuan dan Pengolahan Ikan (Coldstorage), Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jl. Dermaga Muara Angke / Pendaratan Ikan, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara
15	CV. Muara Kerta Jaya	Sebagian Tanah	Fasilitas Bengkel Bubut Kapal Nelayan dan Umum (Docking Kapal) Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jl. Dermaga Muara Angke / Pendaratan Ikan, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara
G.	**KEPALA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAN PENYERTAAN**		

	MODAL PEMERINTAH DKI JAKARTA (BPIPM)		
1	PT. Majuan Masittah Latief	Tanah	Pabrik Kelapa Sawit, Jalan Raya Sumur Timur Kavling Blok Iii Aa No. 9-10, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur
2	PT. Tunas Dipta Persada	Tanah	Kantor, Jalan Industri No. 9-11 (Unit Aloca) Jakarta Pusat
H.	**LURAH GELORA PROV. DKI JAKARTA**		
1	PT. Balats Dwi Tunggal	Sebagian Tanah	Restoran, Jalan Gerbang Pemuda Nomor 1, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat
I.	**BIRO UMUM SETDA**		
1	PT. Jakarta Tourisindo	Sebagian Tanah	Gerai Makanan Dan Minuman Jak Bistro, Areal Gedung Balaikota Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Blok B, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kel. Gambir, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat
J.	**RSUD BUDHI ASIH**		
1	PT. Usaha Cerah Berjaya Abadi	Sebagian Tanah dan Bangunan	Café, Jl. Dewi Sartika No. 200, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Adm. Jakarta Timur
K.	**RSUD KOJA**		
1	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Sebagian Tanah dan Bangunan	ATM, RSUD Koja
2	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Sebagian Tanah dan Bangunan	ATM, RSUD Koja
3	PT. Adhikarsa Cipta Sentosa	Tanah dan Bangunan	Alat Penyedia Mesin Cepat Saji (Vending Machine), Rsud Koja, Jl. Deli No. 4 Rt. 012 Rw.007, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Adm. Jakarta Utara
4	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Sebagian Tanah dan Bangunan	ATM, RSUD Koja
5	CV. Vista Ingan Perdana	Tanah dan Bangunan	Usaha Makanan Dan Minuman, Jl. Deli No. 4 Rt. 012 Rw. 007, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Adm. Jakarta Utara
6	Koperasi Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Koja	Sebagian Tanah dan Bangunan	Koperasi Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Koja (Kopkarko), Jl. Deli No.4, RT 012 RW 007, Kel. Koja, Kec. Koja, Kota Adm. Jakarta Utara
L.	**RSUD PASAR MINGGU**		
1	PT. Adicipta Boga Intiprima	Sebagian Bangunan	Bread Store Imperial Cakery, RSUD Pasar Minggu
2	PT. Diansyah Dinamika Warna	Sebagian Bangunan	Kantin Di RSUD Pasar Minggu, RSUDPasar Minggu
M.	**RSUD PASAR REBO**		
1	PT. Usaha Cerah	Sebagian	Café, Jl. Letnan Jendral Tb Simatupang No. 30,

	Berjaya Abadi	Tanah dan Bangunan	Rt 09 Rw 02, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Adm. Jakarta Timur
2	Koperasi Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	Sebagian Tanah dan Bangunan	Ruang Retail, Areal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, Jl. Letnan Jenderal TB Simatupang No. 30 RT 09 RW 02, Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Kota Adm. Jakarta Timur
N.	**TAMAN MARGASATWA RAGUNAN (TMR)**		
1	PT. Harco Abadi Jaya (Perpanjangan)	Tanah	Sarana Rekreasi, Taman Margasatwa Ragunan Jalan Harsono Rm Nomor 1, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu Kota Adm Jakarta Selatan
2	PT. Stella Jaya Abadi	Sebagian Tanah	Tempat Freezer Ice Cream, Penampungan/Pool Becak/Gerobak Dan 50 Titik Penjualan Ice Cream Miami, Jl. Harsono Rm No. 1 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan
3	CV. Virgini Abadi	Sebagian Tanah	Sarana Rekreasi Dan Hiburan, Jl. Harsono Rm No. 1 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan
4	Koperasi Taman Margasatwa Ragunan (Koprimas)	Sebagian Tanah dan Bangunan	Sarana Pedagang dan Sarana Bermain Anak-anak, Areal Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
O.	**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROV. DKI JAKARTA (BPRD)**		
1	PT. Jamkrida Jakarta	Sebagian Bangunan	Kantor Jamkrida, Jl. Abdul Muis No. 66, Kota Adm. Jakarta Pusat
P.	**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROV. DKI JAKARTA**		
1	PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.	Sebagian Tanah	Prasarana Kereta Api Ringan (Light Rail Transit), Jl. Bungur Area Terminal Kampung Rambutan, Kota Adm. Jakarta Timur
Q.	**KEPALA SUKU BADAN PENGELOLA ASET KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**		
1	LPPOM Majelis Ulama Indonesia Prov. DKI Jakarta	Sebagian Tanah dan Gedung	Kantor Sekretariat, Gedung Graha Mental Spiritual (GMS) Lantai 1 yang terletak di Jl. KH. Mas Mansyur / Jl. H. Awwaludin Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat
R.	**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**		

1	Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya	Sebagian Tanah	Pengelolaan Pasar/Perkulakan (Jakgrosir), Pulau Tidung Kecil, Kec. Kepulauan Seribu Selatan, Kab. Adm. Kepualauan Seribu
S.	**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**		
1	PT. MAC Sarana Jaya	Sebagian Bangunan	Penempatan Perangkat Telekomunikasi (Antena Indoor), Jl. Deli No. 4 RT 012 RW 007, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Adm. Jakarta Utara

4. Nama Kegiatan

   Kerjasama dengan pihak ketiga meliputi 3 kegiatan, yakni :
   a. Sewa
   b. Pinjam Pakai
   c. Pengelolaan dan pembangunan sarana fisik aset (BTO dan BOT)

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

   a. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta d/h Badan Penanaman Modal dan Promosi sebagai pembina Badan Usaha Milik Daerah;
   b. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD);
   c. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Pemanfaatan Aset Daerah untuk kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

   Jumlah pegawai yang mengelola kerjasama dengan pihak ketiga sebanyak 47 orang dari 3 SKPD dengan rincian dan kalsifikasi sebagai berikut

Tabel 6.8 Rekapitulasi Pegawai Badan Pengelola Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

No	Kualifikasi	Jumlah			
		BPMP	**BPKD**	**Dishub**	**Total**
A.	**Golongan**	**12**	**22**	**13**	**47**
	1. Golongan IV	1	2	1	**4**
	2. Golongan III	10	18	9	37

No	Kualifikasi	Jumlah			
		BPMP	BPKD	Dishub	Total
	3. Golongan II	1	2	2	5
	4. Golongan I	0	0	1	1
B.	**Eselon**	**12**	**22**	**13**	**47**
	1. Eselon II	-	-	-	**-**
	2. Eselon III	1	1	1	3
	3. Eselon IV	2	3	3	8
	5. Pelaksana	9	18	9	36
C.	**Pendidikan**	**12**	**22**	**13**	**47**
	1. S3	**0**	**0**	**0**	**0**
	2. S2	1	1	0	**2**
	3. S1	10	15	7	**32**
	4. Diploma	0	4	0	**0**
	5. SLTA	1	2	6	**9**
	6. SLTP	0	0	1	**0**
	7. SD	0	0	0	**0**

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran untuk pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga berasal dari pihak ketiga, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 6.9 Nilai Inventasi dan Nilai Aset Kerjasama dengan Pihak ketiga

No	Jenis Kerjasama	Nilai Invenstasi/ Bangunan	Nilai Aset	Ket.
1.	BOT	71.091.462.572,00	2.944.316.110.000,00	
2.	BTO	306.605.779.808,00	884.593.925.000,00	
3.	KSO	-	-	
	Jumlah	377.697.242.380,00	3.828.910.035.000,00	

Sumber BPAD, 2018

Dari kerjasama tersebut, total nilai aset kerjasama sebesar Rp 4.206.607.277.380 dengan rincian :

- BTO sebesar Rp 1.191.199.704.808,00
- BOT sebesar Rp 3.015.407.572.572,00
- KSO sebesar Rp 0,00

8. Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu kerja sama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu minimal 1 tahun, dan setiap tahun dilakukan evaluasi.

9. Hasil dari Kerjaama

Kerjasama Pemanfaatan Aset dilakukan dengan metode sewa aset daerah dan kerjasama aset daerah. Sewa aset daerah yang direncanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh pendapatan Rp 45.000.000.000,00 sedangkan realisasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp 51.246.646.349,00 atau 113,88%. Kerjasama aset daerah terealisasikan sebesar Rp 4.070.844.087,00 atau 97,76% dari rencana semula sebesar Rp 4.164.000.000,00. Dengan demikian, kerjasama pemanfaatan aset secara keseluruhan terealisir sebesar Rp 55.317.490.436,00 atau 112,52% dari rencana sebesar Rp 49.164.000.000,00

Hasil kerjasama ini adalah adanya pendapatan daerah yang berasal dari sewa aset daerah dan kerjasama pemanfaatan aset daerah.

10. Permasalahan Dan Solusi

Tidak semua kerjasama hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, oleh karena itu dilakukan evaluasi setiap tahun

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Forum Koordinasi

Forum koordinasi disesuaikan dengan besaran dan ruang lingkup permasalahan, sehingga bentuknya dapat berupa :

a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagai pengganti Musyawarah Pimpinan Daerah sesuai PP Nomor 19 Tahun 2010.
b. Rapat Pimpinan
c. Rapat Koordinasi
d. Rapat Evaluasi

e. Koordinasi teknis
f. Rapat biasa.
g. Kegiatan lain yang memerlukan keterlibatan instansi vertikal, seperti sosialisasi peraturan perundang-undangan, tim kerja sesuai amanat peraturan perundang-undangan, tim asistensi dalam suatu kegiatan dan lain-lain.

2. Materi Koordinasi

Materi koordinasi menyangkut berbagai permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah, antara lain :

a. Ketenteraman dan ketertiban umum.
b. Konfirmasi dan konsultasi peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas instansi vertikal.
c. Peningkatan kualitas SDM
d. Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
e. Pemecahan/penyelesian suatu masalah yang berkaitan dengan tugas instansi vertikal.
f. Penerimaan keuangan negara, termasuk dalam rangka penyampaian DIPA.
g. Ipoleksosbudhankamnas.
h. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (dengan PT PLN Disjaya)
i. Operasional Samsat Keliling
j. Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi
k. Pembiayaan.

3. Instansi Vertikal Yang Terlibat

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 20141 tentang Pemerintahan Daerah pasal 67 salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah, kemudian yang dimaksud dengan instansi vertikal dalam undang-undang ini adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Atas dasar peraturan dan perundang-undangan tersebut, maka instansi vertikal yang ada di Jakarta antara lain :

a. Kodam Jaya
b. Polda Metro Jaya
c. Pengadilan Tinggi Jakarta
d. Kejaksaan Tinggi Jakarta

e. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
f. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
g. Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta
h. Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
i. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta
j. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.
k. Kanwil III Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
l. Kanwil VI Direktorat Jenderal Pajak
m. Kanwil IV Bea dan Cukai Jakarta.
n. Kanwil XI Ditjen Perbendaharaan Negara
o. Kepolisian Daerah
p. Instansi TNI, seperti Kodam, Armabar, Arhanud
q. PT PLN Distribusi Jakarta Raya

4. Sumber dan Jumlah Anggaran.

Anggaran untuk koordinasi belum dapat diinvenatrisasi secara pasti, karena melekat pada SKPD/UKPD penyelenggara (leading sektor) koordinasi.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaran Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah.

Koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas dan urgensinya. Inisiatif koordinasi bisa dari Pemerimtah DKI Jakarta atau instansi vetikal yang bersangkutan.

Secara tupoksional, koordinasi pada lingkup Sekretariat Daerah dilakukan oleh para Asisten Sekretaris Daerah, dengan lingkup SKPD/UKPD.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Kegiatan koordinasi tidak ditangani secara khusus oleh SKPD tertentu, tetapi dapat dilakukan oleh setiap SKPD sesuai dengan keperluannya.

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan

Jumlah kegiatan koordinasi tidak tercatat secara pasti, mengingat kegiatan koordinasi bisa datang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau instansi vertikal yang bersangkutan.

8. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Hasil dan manfaat koordinasi antara lain :

a. Adanya keterlibatan instansi vertikal dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, secara langsung maupun tidak langsung.
b. Adanya sinkronisasi program atau kegiatan antara instansi vertikal dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
c. Adanya kontribusi tertentu dari dan atau kepada instansi vertikal sesuai dengan hasil koordinasi. Contoh instansi vertikal terentu menyaipkan buku materi untuk soosialisasi tertentu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan operasional, dan lain-lain.
d. Adanya kelancaran kegiatan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun instansi vertikal.
e. Adanya saling manfaat bersama lainnya *(mutual benefit)*.

9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi.

Tindak lanjut hasil koordinasi sangat variatif sesuai dengan urgensi koordinasi. Ada yang bersifat operasional seperti kegiatan pengamanan, ada yang bersifat kebijakan seperti keluarnya NJOP, ada yang berisifat bantuan finansial untuk kegiatan tertentu, validasi data, kerjasama operasional dan lain sebagainya.

10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Mengingat masih terdapat beberapa instansi vertikal di Provinsi, maka ketentuan tentang koordinasi sebaiknya diperbaharui.

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Sengketa Batas Wilayah

Selama tahun 2018 tidak terdapat sengketa batas wilayah

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas

Wilayah

Substansi Pembinaan Batas Wilayah merupakan salah satu tupoksi Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, tepatnya pada Subbagian Penataan dan Pengembangan Wilayah Bagian Bina Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Gubernur 250 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah .

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Sampai dengan 31 Desember 2018 pegawai Subbagian Penataan dan Pengembangan Wilayah Bagian Bina Pemerintahan Biro Tata Pemerintahan sebanyak 3 orang.

Tabel 6.10 Rekapitulasi Pegawai Subbagian Penataan dan Pengembangan Wilayah Biro Tata Pemerintahan

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	**Golongan**		
	• Golongan IV	1	
	• Golongan III	2	
	• Golongan II	0	
B.	**Eselon**		
	• Eselon III	0	
	• Eselon IV	1	
	• Pejabat Fungsional Umum	2	
C.	**Pendidikan**		
	• S2	2	
	• S1	1	

Sumber : Biro Tata Pemerintahan, 2018

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Dilihat dari kondisi geografi, demografi, sosial maupun kedudukan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara, ada bebarapa potensi yang menyebabkan Provinsi DKI Jakarta rawan bencana antara lain :

- Sebagai daerah pantai, bencana mungkin datang dari laut seperti adanya banjir pasang air laut, tsunami dan erosi pantai (abrasi).

- Sebagai muara dari 13 sungai, potensi bencana berupa banjir, pencemaran air dan sampah yang terbawa dari daerah hulu.
- Sebagai daerah yang padat penduduk, bencana yang potensial terjadi seperti kebakaran dan wabah penyakit.
- Sebagai Ibukota Negara, Jakarta memiliki potensi menjadi tempat pelaku kejahatan nasional maupun internasional, seperti kegiatan terorisme, perdangan narkotika dan lain-lain.

Dari beberapa potensi tersebut, terdapat bencana yang intensitas/frekuensinya cukup tinggi, yaitu sebagai berikut :

1. Bencana Yang Terjadi

   a. Kebakaran

      Pada Periode Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2018 telah terjadi bencana kebakaran sebanyak 692 kejadian, dengan uraian kejadian kebakaran sebagaimana terjabarkan dalam rekapitulasi kejadian kebakaran berdasarkan bulan, wilayah, penyebab kebakaran, waktu terjadinya kebakaran serta obyek yang terbakar, sebagaimana berikut :

Tabel 6.11 Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Tahun 2018

NO	WILAYAH	JUMLAH KEJADIAN (X)	Penyebab Kebakaran					JUMLAH SARANA YANG RUSAK							JUMLAH KORBAN					JUMLAH NILAI KERUGIAN (Rp)
			Korsleting Listrik	Tabung Gas	Pembakaran Sampah	Lilin	dll	Rumah Tinggal	Semi Permanen	Gedung	Gudang	Kios / Ruko	Kendaraan	Lain2	Meninggal	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Pengungsi (Jiwa)	
1	JAKARTA PUSAT	96	70	14	3	1	8	293	134	17	6	27	0	12	3	0	3	48	1637	Rp 30.315.375.000,00
2	JAKARTA UTARA	114	87	12	1	2	12	243	33	8	4	16	5	20	7	0	5	19	579	Rp 31.910.390.000,00
3	JAKARTA BARAT	142	101	15	6	5	15	647	216	7	6	36	4	16	8	0	7	47	3338	Rp 49.903.900.000,00
4	JAKARTA SELATAN	158	115	23	2	1	17	184	2	16	3	27	15	20	3	0	4	21	214	Rp 25.811.500.000,00
5	JAKARTA TIMUR	177	118	29	6	2	22	298	97	11	13	73	14	32	4	0	4	24	580	Rp 42.301.300.000,00
6	KEPULAUAN SERIBU	5	3	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	Rp 28.500.000,00
JUMLAH TOTAL		692	494	95	18	11	74	1667	482	60	32	180	38	101	25	0	23	159	6348	Rp. 180.270.965.000,00

Catatan : sumber Pusat data dan kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta

b. Banjir

Kejadian bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 sebanyak 46 kejadian tersebar di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur dengan ketinggian rata - rata 20-300cm. *Data lengkap terlampir.*

Tabel 6.12 Rekapitulasi Kejadian Kebakaran di Wilayah DKI Jakarta Periode Tahun 2007 s.d. 2013

REKAPITULASI KEJADIAN BANJIR TAHUN 2018																
NO	BULAN	WILAYAH		kISARAN KETINGGIAN AIR	LAMA GENANGAN (HARI)/BULAN	JUMLAH TERDAMPAK			JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH KORBAN					JUMLAH TEMPAT PENGUNGSIAN	JUMLAH NILAI KERUGIAN (Rp)
		KECAMATAN	KELURAHAN			RW	KK	JIWA		Meninggal	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	JML Total Pengungsi (Jiwa)		
1	JANUARI	5	8	5 - 40 cm	1 s/d 3 hari	25	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
2	FEBRUARI	24	43	10 - 270 cm	1 s/d 4 hari	162	5.467	19.456	5	1	-	1	-	15.558	60	-
3	MARET	6	8	10 - 100 cm	1 hari	21	303	1.000	4	-	-	-	-	-	-	-
4	APRIL	6	8	5 - 100 cm	1 hari	19	300	988	6	-	-	-	-	-	-	-
5	MEI	8	17	10 s/d 150 cm	1 hari	47	214	716	4	-	-	-	-	69	2	-
6	JUNI	5	8	10 s/d 100 cm	1 hari	18	328	1.068	2	-	-	-	-	-	-	-
7	JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	OKTOBER	4	5	10 s/d 80 cm	1 hari	13	387	1.001	2	-	-	-	-	-	-	-
11	NOVEMBER	11	16	5 s/d 100 cm	1 hari	28	1.848	7.597	7	-	-	-	-	-	-	-
12	DESEMBER	14	22	3 s/d 100 cm	1 hari	38	244	877	9							
	Jumlah						**9.091**	**32.703**	**46**	**1**	**-**	**1**	**-**	**15.627**	**62**	**-**

C. Konflik Terjadi

Terjadi 3 kali konflik sosial yang mengakibatkan 2 Luka Berat dan 13 Luka Ringan.

Tabel 6.13 Rekap Konflik Sosial

No	Waktu Kejadian		Lokasi		Massa	Tuntutan/ Penyebab
	Hari/ Tanggal	Pukul	Alamat	Wilayah		
1	Sabtu, 20 Juni 2015	18.30-18.55 Wib	Area Pintu Gambir Silang Monas	Jakarta Pusat	Pedagang	
2	Senin, 13 Juli 2015	13.30-15.00 Wib	Jl. Cilincing	Jakarta Utara	Warga G.0161	Kecemburuan sosial & balas dendam, dimana seminggu yg lalu ada masalah/ ribut antara FBR G.0161 dengan salah seorang warga di Rt tersebut diatas, dimana warga melakukan giat meminta bantuan kepada para pedagang2 buah untuk anak yatim yang sebenarnya pedagang-pedagang tersebut sudah dikenakan upeti untuk FBR.
3	Kamis, 20 Agustus 2015	09.20 Wib	Jl. Jatinegara Barat	Jakarta Timur	Sebagian Warga Kampung Pulo RW 01,02 dan 03	Ketidakmauan sebagian warga kampung Pulo RW 01, 02 dan 03 untuk pindah ke rusun Jatinegara

2. Status Bencana

Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menerbitkan status bencana baik tingkat Nasional/Regional/Provinsi maupun lokal Kabupaten/Kota mengingat kejadian bencana yang terjadi tidak melumpuhkan DKI Jakarta baik segi ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan maupun sosial budaya.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Adapun anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD Tahun 2018 sebesar Rp 1,161,472,813,481 ,- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.14 Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DINAS PEMADAM KEBAKARAN Dan PENAGGULANGAN BENCANA	1,161,472,813,481	**649.235.099.714**	**89,46%**
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	751.681.690.000	727.770.748.978	96,82%
2. BELANJA LANGSUNG	409.791.123.481	311.267.323.095	75,96%

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

a) Program Pengelolaan Risiko Bencana :

- Pembinaan dan Pelatihan Relawan Serta Potensi Masyarakat lainnya;
- Penyusunan Strategi Jakarta Sebagai Kota Tangguh Bencana di Provinsi DKI Jakarta;
- Penyusunan Standarisasi Rumah Sakit dan Pasar Aman Bencana di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- Pembinaan, Pendampingan dan Simulasi Sekolah / Madrasah Aman Dari Bencana Serta Penyediaan Perlengkapannya di Provinsi DKI Jakarta;
- Piket Siaga Bencana;
- Penyediaan Perlengkapan Pendukung Gudang Logistik;
- Pembinaan Kelurahan tangguh Bencana;
- Penyusunan Pergub tentang Sistem Komando Penagangan Darurat Bencana Tingkat Provinsi DKI Jakarta;
- Penyusunan Pergub tentang Standar kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana Tingkat Provinsi DKI Jakarta;
- Penyusunan Pergub tentang Mekanisme Penanganan Darurat Bencana di Provinsi DKI Jakarta;
- Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana;
- Pemeliharaan DIMS dan Pengelolaan Website BPBD Provinsi DKI Jakarta;
- Evaluasi ISO 9001:2015 PDIK BPBD Provinsi DKI Jakarta;
- Pembayaran abodemen dan tagihan telepon call center 112 BPBD Provinsi DKI Jakarta;

- Penyediaan dan perawatan server penunjang penanggulangan bencana;
- Desiminasi Informasi Kebencanaan;
- Perawatan Peralatan Early Warning System (EWS);

b) Program Penanggulangan Bencana :

- Review Rencana Kontijensi Bencana Banjir di Provinsi DKI JakartaPenyediaan Buffer Stock Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
- Penyediaan Bufer Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
- Peningkatan Kapasitas Relawan Dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA);
- FGD Fungsi Relawan dalam hal Penanganan Psikososial di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- Penyediaan sarana Pendukung Pemulihan Fisik Pasca Bencana;
- Peningkatan Kapasitas dan Simulasi Penanggulangan Bencana Pada Fasilitas Publik dan Gedung Serta Manajemen dan Siswa Yayasan / Sekolah Penyandang Disabilitas di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- Penyediaan Jaringan Komunikasi Penanggulangan Bencana

c) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Trantibumlinmas

Penyusunan Renstra SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana

Penanganan bencana di Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh beberapa SKPD sesuai dengan status bencana, volume bencana dan antisipasi atau penanggulangan yang harus dilakukan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara rutin penanganan bencana karena tupoksinya adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana,

Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan beberapa SKPD lain.

Tahun 2011 telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang sudah beroperasional secara efektif mulai tahun 2012.

SKPD yang menangani bencana berdasarkan Pergub 39 Tahun 2014 tentang Pembagian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Bencana :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Walikota/Bupati Administrasi
3. Satuan Polisi Pamong Praja
4. Dinas Tata Air
5. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Sosial
8. Dinas Kebersihan
9. Dinas Pertamanan dan Permakaman
10. Dinas Perindustrian dan Energi
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas pendidikan
13. Dinas Olah Raga dan Pemuda
14. Dinas Kelautan Pertanian dan Perikanan
15. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
16. Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan
17. Dinas Penataan Kota
18. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
19. Badan Penanaman Modal Dan Promosi
20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
21. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
22. Kecamatan
23. Kelurahan

24. PDAM
25. RSUD

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Khusus pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan jajarannya sampai ke tingkat Kecamatan berjumlah 2.755 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6.15 Rekapitulasi Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	**Golongan**		
	• Golongan IV	18	
	• Golongan III	35	
	• Golongan II	12	
	• Golongan I	0	
B.	**Eselon**		
	• Eselon II		
	• Eselon III		
	• Eselon IV		
	• Fungsional		
	• Staf		
C.	**Pendidikan**		
	• S3	0	
	• S2	20	
	• S1	33	
	• Diploma	9	
	• SLTA	6	
	• SLTP	0	
	• SD	0	

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran, 2018

7. Kelembagaan yang Dibentuk Khusus menangani Bencana

Penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 sebagai

leading sector dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagai pelaksana lapangan.

Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Potensi bencana di DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana :

1. Banjir
2. Kebakaran pemukiman
3. Epidemi dan Wabah Penyakit
4. Konflik Sosial
5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi
6. Kegagalan Teknologi
7. Cuaca ekstrim
8. Gempa Bumi

8. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penanggulangan bencana antara lain berupa sarana dan prasarana pemadam kebakaran, sarana evakuasi korban bencana, dapur umum dan alat-alat lainnya yang digunakan secara terintegrasi dalam penanggulangan bencana dan penangan pengungsi

Tabel 6.16 Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran

No	Uraian	Jumlah
A.	**Gedung**	
	1. Kantor Dinas	1 Gedung
	2. Kantor Suku Dinas	5 Gedung
	3. Kantor Sektor	25 Gedung
	4. Pos Pemadam	77 Gedung
	5. Pusat Pendidikan dan Latihan	1 Kawasan
	6. Kantor Bengkel	1 Kawasan
	7. Kantor Laboratorium	1 Gedung
B.	**Kendaraan Operasional**	
	1. Mobil Pompa 2.500 L	75 unit
	2. Mobil Pompa 4.000L	148 unit

No	Uraian	Jumlah
	3. Mobil Pompa 10.000L	31 unit
C.	**Peralatan Pendukung Operasional**	
	1. Perahu Karet	170 unit
	2. Motor Pompa	103 unit
D.	**Alat Komunikasi**	
	1. Radio HT	641 buah
	2. Radio RIG	240 buah

Sumber : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Dalam Pengelolaan kawasan khusus tidak terdapat perubahan. Kawasan dalam hal ini bukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kawasan dalam arti luas, yaitu suatu wilayah yang dikelola oleh pihak tertentu karena memiliki karakteristik atau fungsi tertentu. Di Provinsi DKI Jakarta terdapat beberapa kawasan yang dikelompokkan sebagai berikut :

1. Jenis Kawasan

   a. Kawasan otorita (Dikelola Pusat), yaitu Gelora Bung Karno dan Bandar Baru Kemayoran.
   b. Kawasan Pelabuhan (Dikelola Pusat, Pemda dan Swasta), yaitu : Pelabuhan Tanjung Priok; Pelabuhan Sunda Kelapa; Pelabuhan Ikan Muara Baru; Pelabuhan Marunda; dan Pelabuhan Khusus (Bogasari dan Pertamina).
   c. Kawasan Bandar Udara (Dikuasai ABRI), yaitu Bandar Udara Halim Perdana Kusuma
   d. Kawasan Industri (Dikelola Pemda dan Swasta), yaitu : Kawasan berikat Nusantara; dan Perkampungan Industri Kecil (PIK).
   e. Kawasan Kehutanan (Dikelola Pemda), yaitu Hutan Lindung Muara Angke; dan Taman Laut Kepulauan Seribu.
   f. Kawasan Pariwisata (Dikelola oleh Badan Pengelola Nasional dan Daerah), yaitu Taman Mini Indonesia Indah; Monumen Nasional; Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur; Ancol, Kebun Binatang Ragunan.
   g. Kawasan Jalan Bebas Hambatan (Dikuasai PT. Jasa Marga dan Swasta), yaitu : Jalan Tol Dalam Kota; Jalan Tol Merak; Jalan Tol Jagorawi; Jalan Tol Cikampek; Jalan Tol TB Simatupang (Pondok Indah); dan Jalan Tol Prof. Sedyatmo.
   h. Kawasan Militer (dikuasai ABRI), yaitu : Kawasan Militer Cijantung; dan Kawasan Militer Cilangkap.

2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus

Sebagaimana telah dijelaskan, status kepemilikan sesuai dengan status kepengolaannya, yaitu milik Pusat oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian (seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan dan Keamanan), milik Daerah oleh SKPD, BUMD dan swasta.

3. Sumber Anggaran

Sumber anggaran pengelolaan kawasan-kawasan tersebut diatas dibebankan kepada APBN untuk kawasan yang dikelola oleh Pusat dan BUMN, APBD untuk kawasan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan anggaran oleh pihak swasta untuk kawasan yang dikelola swasta.

4. Permasalahan Yang Dihadapi dan Solusi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap bahwa kawasan-kawasan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dapat dikelola bersama dengan Pemerintah Daerah, dan atau minimal terdapat kontribusi untuk Pemerintah Daerah. Hal ini sudah disampaikan kepada Pemerintah Pusat, akan tetapi hingga saat ini belum terdapat tanggapan yang realistis.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Kawasan Khusus

Meskipun terdapat banyak kawasan sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi dikarenakan kepemilikan, anggaran dan pengelolaannya berbeda-beda, maka tidak terdapat satuan kerja khusus yang menangani berbagai kawasan khusus dimaksud. Kawasan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya kawasan Hutan Lindung Muara Angke yang dikelola Dinas Kelautan dan Pertanian, dan Taman Laut Kepulauan Seribu yang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kelautan dan Pertanian

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah dan kualifikasi pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengelola kawasan dimaksud sebagaimana uraian pada urusan wajib dan urusan pilihan di Bab III sesuai dengan bidangnya masing-masing.

G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum

1. Gangguan Yang Terjadi

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal bagi setiap warga negara dan setiap bangsa untuk melanjutkan kehidupannya yang layak. Seseorang tidak bisa melaksanakan aktivitas kehidupannya jika berada dalam kondisi tidak aman dan tidak tertib. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyaraat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan ketertiban umum dan ketentraman yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasa 255 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi:

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada;
c. Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala

Daerah, menyelenggarakan ketertiban umm dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan aparatur lainnya;

f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Perkada;
g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab dalam menyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dihadapkan pada situasi dan permasalahan yang begitu kompleks karena Provinsi DKI Jakarta merupakan ibukota negara Republik Indonesia dan pusat dari seluruh aktivitas pemerintahan dengan luas wilayah yang terbatas namun masyarakat yang tinggal begitu heterogen.

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Adapun gangguan-gangguan potensial yang terjadi di wilayah DKI Jakarta antara lain:

a) Kejahatan konvensional maupun modern

Kejahatan konvensional yang berskala kecil hingga besar seperti penodongan, pencopetan, pencurian ringan hingga pencurian dengan kekerasan masih sering terjadi di wilayah DKI Jakarta. Sedangkan kejahatan modern biasanya menggunakan teknologi canggih seperti teknologi internet, ATM, Handphone dan sistem perbankan;

b) Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika juga masih potensial terjadi di wilayah DKI Jakarta. Tidak hanya di kalangan masyarakat biasa, tetapi juga melibatkan publik figur.

c) Banyaknya Pelanggaran Reklame

Pelanggaran reklame marak terjadi di wilayah DKI Jakarta. Adapun pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran dalam hal dimensi ukuran reklame yang tidak sesuai dengan rekomendasi dan ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar operasi penertiban reklame. Operasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

d) Banyaknya bangunan liar atau hunian liar (permanen ataupun semi permanen)

Banyaknya bangunan yang tidak sesuai peruntukan zonasi seperti yang teruang dalam Perda No. 1 Tahun 2014 tantang rencana detail Tata Ruang dan peraturan zonasi Provinsi DKI Jakarta, misalnya alih fungsi lahan untuk mall, berdirinya bangunan liar untuk tempat tinggal maupun berdagang di sepanjang jalur hijau.

e) Banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berdagang di tempat yang tidak sesuai peruntukan

Banyaknya keberadaan pedagang kaki lima yang berdagang di tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya. selain itu banyaknya keberadaan PMKS (Penyandang Masalah Kesenjangan Sosial) di fasilitas umum dan fasilitas sosial sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat.

Tahun 2018 merupakan tahun yang berkesan bagi provinsi DKI Jakarta, karena pada tahun ini DKI Jakarta ditunjuk menjadi salah satu tuan rumah event olahraga terbesar se-Asia yaitu Asian Games 2018. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat bersama dengan TNI dan Polri ikut membantu pengamanan venue olahraga dan pengamanan perjalanan para atlet dari hotel menuju venue olahraga. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta juga memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban umum melalui beberapa kegiatan, yaitu:

1. Penyelenggaraan Penertiban Bagi Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya
2. Penyelenggaraan Bantuan Pengamanan;
3. Piket Monitoring Tramtibum 1x24 Jam;
4. Penyelenggaraan Sidang Yustisi terhadap Pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
5. Piket Posko Operator dan Linmas di tingkat Kota Administrasi;
6. Bantuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat oleh Pegawai Tidak Tetap (PTT);
7. Bantuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Tingkat Kelurahan

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani

Dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta didukung oleh beberapa instansi terkait yang selalu berkoordinasi melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD). Adapun instansi tersebut antara lain:

a. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
b. Pangdam Jaya
c. Kapolda Metro Jaya
d. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
e. Ketua PengadilanTinggi DKI Jakarta
f. Panglima Komando Armada I Barat
g. Panglima Koops Angkatan Udara

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta saat ini berjumlah 3.151 orang PNS/CPNS serta tenaga tambahan sebanyak 1.624 orang PTT, sebagian besar berpendidikan SLTA.

Tabel 6.17 Rekapitulasi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

No	Kualifikasi	Satpol PP							Jumlah
		Provinsi	JP	JU	JB	JS	JT	P.1000	
A.	**Golongan (Jumlah)**	**359**	**507**	**443**	**521**	**630**	**589**	**102**	**3151**
	1. Golongan IV	18	2	2	3	6	2	1	**34**
	2. Golongan III	76	99	66	99	113	134	17	**604**
	3. Golongan II	260	397	363	406	500	442	83	**2451**
	4. Golongan I	5	9	12	13	11	11	1	**62**
B.	**Eselon (Jumlah)**	**26**	**12**	**11**	**12**	**13**	**14**	**6**	**94**
	1. Eselon I	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Eselon II	1	0	0	0	0	0	0	1
	3. Eselon III	6	1	1	1	1	1	1	12
	4. Eselon IV	19	11	10	11	12	13	5	81
	5. Eselon V	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Fungsional	2	0	0	0	0	0	0	2
	7. Staf/pelaksana	331	495	432	509	617	575	96	3055
	8. Pegawai Tidak Tetap (PTT)	**221**	**249**	**171**	**290**	**337**	**340**	**16**	**1624**
C.	**Pendidikan (Jumlah)**	**359**	**507**	**443**	**521**	**630**	**589**	**102**	**3151**
	1. S3	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. S2	16	2	2	3	7	0	1	31
	3. S1	66	78	48	75	93	86	16	462
	4. Diploma	5	1	1	1	2	1	0	11
	5. SLTA	262	412	374	428	506	499	84	2565
	6. SLTP	10	7	14	13	19	3	0	66
	7. SD	0	7	4	1	3	0	1	16

sumber : Satpol PP Prov. DKI Jakarta, 2018

4. Penanggulangan dan Kendalanya

Beberapa masalah yang dihadapi serta solusi yang dilakukan dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di DKI Jakarta Tahun 2018, antara lain:

a) Permasalahan :

- Jumlah anggota Satpol PP yang tidak sebanding dengan jumlah titik rawan serta jumlah kegiatan yg melibatkan masa yang cukup banyak
- Penertiban Skala besar banyak terkendala karena tidak adanya tindak Lanjut Pasca Penertiban
- Perlunya SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan penertiban yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 285 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

- Seringnya terjadi gesekan antara personil Satpol PP dengan masyarakat pada saat penertiban

b) Solusi :

- Perlunya kajian mendalam terkait titik rawan tramtibum dan indeks pelanggaran Perda dan/atau Perkada sehingga dapat digunakan untuk penempatan personil di lapangan
- SKPD yang mengusulkan Penertiban sudah menyiapkan kegiatan / Penataan di Lokasi yang sudah di tertibkan
- Perlu adanya perumusan SOP untuk setiap jenis kegiatan penertiban
- Perlu adanya peningkatan kapasitas (capacity building) maupun refreshment untuk personil Satpol PP khususnya refreshment tentang Perda/Perkada, TUPOKSI Satpol PP dan kemampuan *Public Speaking*

5. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan

Selain Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Aparat di luar perangkat daerah seperti Kepolisian dan TNI dilibatkan dalam penciptaan ketenteraman dan keterliban Ibukota sesuai dengan lingkup pengamanannya. Secara berjenjang dari tingkat Kelurahan sampai Provinsi, aparat Kepolisian dan TNI diikutsertakan dalam kegiatan penertiban dan pengamanan.

Polisi dan TNI dalam kegiatan penertiban diposisikan untuk mem-back up bila terjadi hal-hal di luar perkiraan yang dapat membahayakan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta maupun masyarakat yang menjadi obyek penertiban.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 1.214.902.456.434

Tabel 6.18 Anggaran Satpol PP

URAIAN		ALOKASI (Rp)		REALISASI (Rp)	%
GABUNGAN	**Rp**	**1.214.902.456.434**	**Rp**	**1.089.717.392.142**	**90**
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	**Rp**	804.318.653.000	**Rp**	787.418.472.619	90
2. BELANJA LANGSUNG	**Rp**	410.583.803.434	**Rp**	302.298.919.523	98
a. BELANJA PEGAWAI	Rp	156.739.413.198	Rp	152.220.273.475	74
b. BELANJA BARANG DAN JASA	Rp	132.661.927.383	Rp	52.866.405.487	40
- Belanja Pemeliharaan	Rp	7.933.024.055	Rp	4.700.720.008	59
c. BELANJA MODAL	Rp	120.770.629.409	Rp	97.229.238.925	81

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed* BPKD Prov.DKI Jakarta